



DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN 2022  
DALAM ANGKA DAN NARASI

**BerAKHLAK**  
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkompetensi  
Berkeadilan Berprestasi Berkeadilan Berkompetensi

**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



# DAFTAR ISI

A.	DAFTAR ISI	2
B.	DASAR HUKUM	9
C.	TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10
D.	STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PP	15
E.	TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PP	16
F.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PUU	
F.1	TUGAS & FUNGSI SEKRETARIAT DITJEN PP	18
F.2	PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 – 2021	19
F.3	ASET DITJEN PP	20
F.4	PNBP DITJEN PP	21
F.5	PROFIL BMN DITJEN PP	22
F.6	JUMLAH PEGAWAI DITJEN PP	24
F.7	JUMLAH PPNPN DITJEN PP	31
F.8	JUMLAH PERANCANG PUU DI UNIT KERJA ES I LAINNYA KEMENKUMHAM, KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN & PEMDA	32
F.9	JUMLAH POSTINGAN SOSIAL MEDIA JANUARI – DESEMBER 2022	33





# DAFTAR ISI

F.10	GRAFIK POSTINGAN SOSIAL MEDIA PER BULAN	34
F.11	OPERA	35
F.12	KERJA SAMA LUAR NEGERI	37
F.13	KUNJUNGAN DAN SEMINAR	38
F.14	DUKUNGAN KERJA SAMA DALAM REVISI UU NO 12 TAHUN 2011	39
F.15	PENYUSUNAN BUKU PANDUAN	40
F.16	PROYEK 2	41
F.17	PENERIMA BEASISWA KYUSHU UNIVERSITY	43
F.18	PENERIMA SHORT COURSE	44
F.19	RAPAT PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	45
G.	DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
G.1	TUGAS DAN FUNGSI	47
G.2	KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48
G.3	PENYUSUNAN RANCANGAN PUU	49





# DAFTAR ISI

G.4	RINCIAN DATA PENYUSUNAN RANCANGAN PUU	50
G.5	PENYELARASAN RANCANGAN PERMENKUMHAM	51
G.6	HARMONISASI PERATURAN KEMENTERIAN/BADAN/LEMBAGA	52
G.7	PEMBAHASAN RUU	53
G.8	DIALOG PUBLIK RUU KUHP	54
H	DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	
H.1	TUGAS DAN FUNGSI	57
H.2	TOTAL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - HPP I	58
H.3	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	59
H.4	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	61
H.5	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG HUKUM DAN HAM	63
H.6	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG SDM, KELEMBAGAAN, & KESEJAHTERAAN RAKYAT	64





# DAFTAR ISI

I	DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	
I.1	TUGAS DAN FUNGSI	68
I.2	TOTAL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES – HPP II	69
I.3	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BUMN, DAN PENANAMAN MODAL	70
I.4	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL & FISKAL	73
I.5	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG SDA, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA & TATA RUANG	75
I.6	PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	78





# DAFTAR ISI

J	DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH & PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
J.1	TUGAS DAN FUNGSI	80
J.2	PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS & AKREDITASI	81
J.3	FASILITASI DAN PEMBINAAN SUBSTANSI PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM	82
J.4	KANTOR WILAYAH YANG MENGIRIMKAN SURAT SELESAI HARMONISASI TAHUN 2022	83
J.5	KANTOR WILAYAH YANG MENGIRIMKAN SURAT PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	84
J.6	PENDAMPINGAN/SUPERVISI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA KANWIL KEMENKUMHAM	85
J.7	FASILITASI KONSULTASI PERDA	86
J.8	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIK PERANCANG PUU	87
J.9	KEGIATAN PEMBINAAN KARIR PERANCANG PUU TAHUN 2022	88
J.10	JUMLAH DATA PERANCANG TINGKAT NASIONAL	89
J.11	TUGAS SEBAGAI INSTANSI PEMBINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90





# DAFTAR ISI

J.12	PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	92
J.13	PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN JUMLAH INSTANSI	93
J.14	PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN JUMLAH KEGIATAN PER BULAN	94
J.15	GRAFIK PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN JUMLAH KEGIATAN PER BULAN	95
K	DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, & PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
K.1	TUGAS DAN FUNGSI	97
K.2	JUMLAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98
K.3	JUMLAH PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99
K.4	JUMLAH PUBLIKASI JURNAL LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100
K.5	JUMLAH PUBLIKASI PERATURAN & JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE	101
K.5	JUMLAH APLIKASI DITJEN PP	102





# DAFTAR ISI

L.	DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
L.1	TUGAS DAN FUNGSI	104
L.2	JUMLAH JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN DI MK TAHUN 2022	105
L.3	JUMLAH JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN DI MA TAHUN 2022	106
L.4	DATA PUTUSAN E-LITIGASI	107
L.5	GRAFIK PUTUSAN BIDANG POLHUKAM DI MK & MA TAHUN 2022	109
L.6	GRAFIK PUTUSAN BIDANG PEREKONOMIAN DI MK & MA TAHUN 2022	110
L.7	GRAFIK PUTUSAN BIDANG KESRA DI MK & MA TAHUN 2022	111
L.8	PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) <i>LEGAL OPINION, EXECUTIVE REVIEW</i> TAHUN 2022	112
M.	PRODUK DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	113
N.	INOVASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	114
O.	PENGHARGAAN YANG TELAH DIPEROLEH	116
M.	GLOSARIUM	118





# DASAR HUKUM

- UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
- DIPA DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2022 NOMOR : SP DIPA- 013.08.1.626181/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021





# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PEMBAHASAN

PENGESAHAN/  
PENETAPAN

PENGUNDANGAN

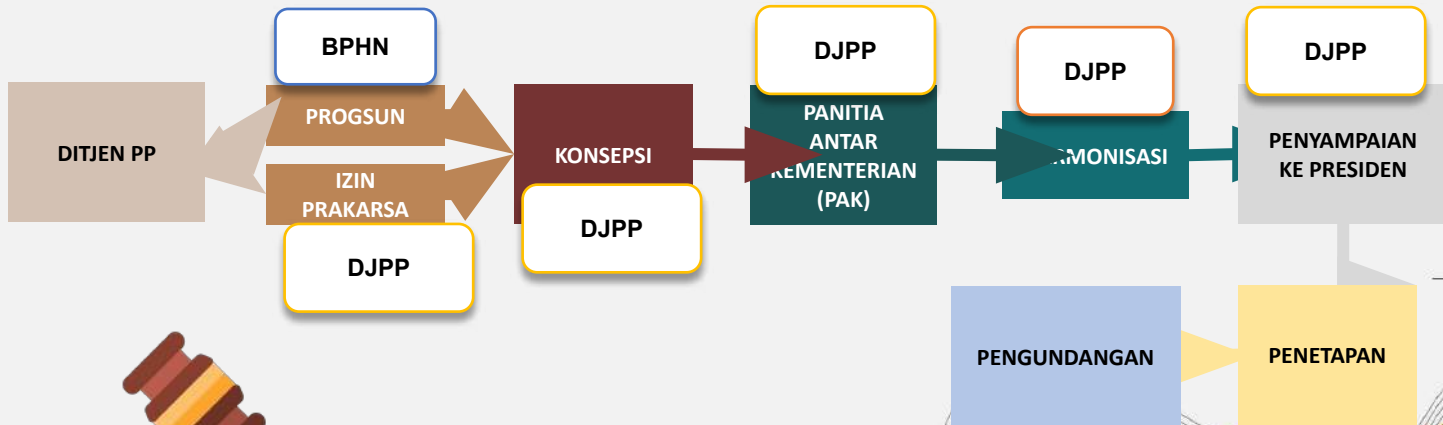
# PROSES PEMBENTUKAN RUU PRAKARSA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



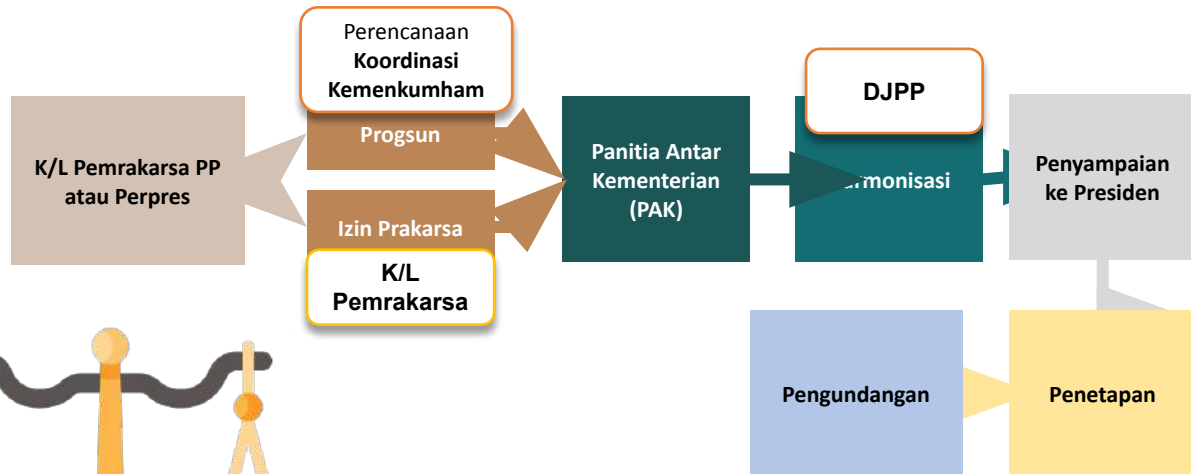




# PENYUSUNAN PP DAN PERPRES PRAKARSA KEMENKUMHAM



# PENYUSUNAN PP DAN PERPRES PRAKARSA KEMENTERIAN/LEMBAGA



# PROFIL PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.**

**Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan**



**Ceno Hersusetiokartiko, Bc.Ip, S.H., M.H.**

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan**



**Cahyani Suryandari, S.H., M.H.**

**Direktur Perancangan  
Peraturan Perundang-undangan**



**Dr. Roberia, S.H., M.H.**

**Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan I**



**Unan Pribadi, S.H., M.H.**

**Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II**



**Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.**

**Direktorat Fasilitasi Perancangan  
Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang  
Peraturan Perundang-undangan**



**Ardiansyah, S.H., M.H.**

**Direktur Pengundangan,  
Penerjemahan, dan Publikasi  
Peraturan Perundang-undangan**



**Liestiarini, S.H., M.H.**

**Direktur Litigasi  
Peraturan Perundang-undangan**

# TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## TUGAS

MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

## FUNGSI

- PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERANCANGAN, HARMONISASI, PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN PUBLIKASI, LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH SESUAI PERMINTAAN DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERANCANGAN, HARMONISASI, PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN PUBLIKASI, LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH SESUAI PERMINTAAN DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PERANCANGAN, HARMONISASI, PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN PUBLIKASI, LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH SESUAI PERMINTAAN DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERANCANGAN, HARMONISASI, PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN PUBLIKASI, LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH SESUAI PERMINTAAN DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM





# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN





## TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### FUNGSI

MEMBERIKAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN ORGANISASI

### TUGAS

1. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM, DAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. PENGELOLAAN URUSAN KEUANGAN

2. KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN RB

6. PENGELOLAAN URUSAN BMN

3. EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

7. PELAKSANAAN URUSAN HUMAS DAN KERJA SAMA

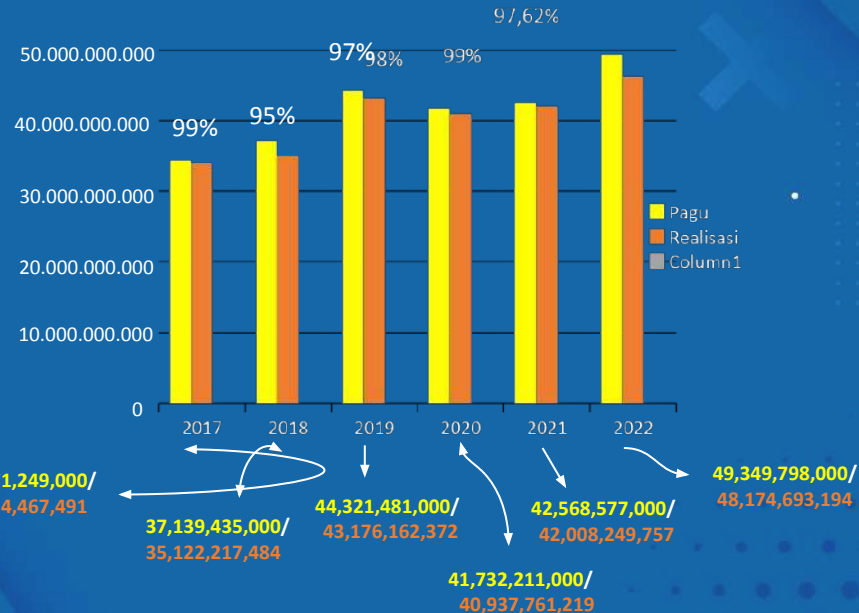
4. PENGELOLAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

8. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN, KEPROTOKOLAN, DAN KERUMAHTANGGAAN

# PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 - 2022



Tahun	Pagu	Realisasi	(%)
2017	34,371,249,000	34,034,467,491	99%
2018	37,139,435,000	35,122,217,484	95%
2019	44,321,481,000	43,176,162,372	97%
2020	41,732,211,000	40,937,761,219	98%
2021	42,568,577,000	42,008,249,757	99%
2022	49,349,798,000	48,174,693,194	97,62%



\*dalam rupiah

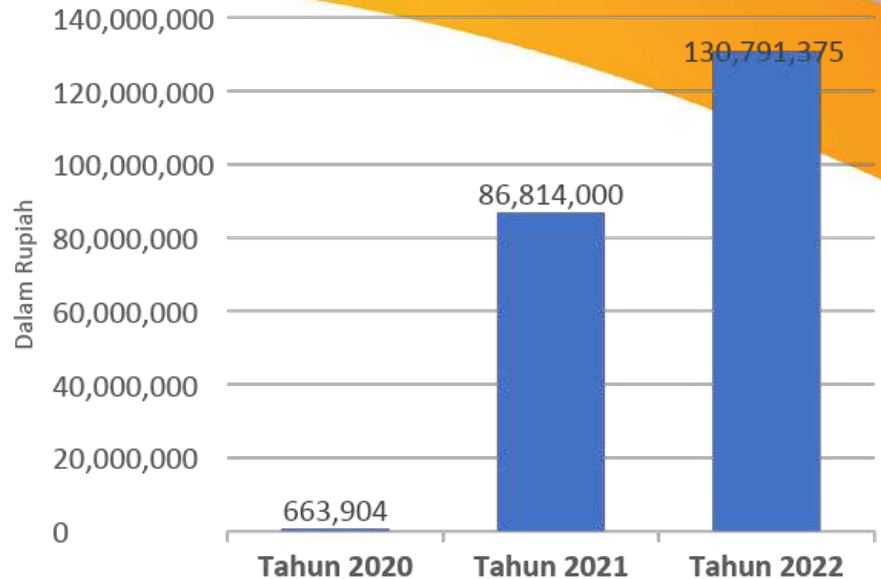
## ASET DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**TOTAL ASET :  
Rp 57.232.761.091**



## PNBP DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**PNBP DITJEN PP  
BERASAL DARI  
PENJUALAN ASET  
YANG SUDAH TIDAK  
DIGUNAKAN DALAM  
OPERASIONAL  
PEMERINTAHAN**



## PROFIL BMN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



NO	DESKRIPSI	EKSISTING
1	JUMLAH GEDUNG	1 UNIT
2	LUAS BANGUNAN	4.236 M2
3	JUMLAH LANTAI	5 LANTAI
4	JUMLAH RUANGAN ESELON I	1 RUANGAN
5	JUMLAH RUANGAN ESELON II	7 RUANGAN
6	JUMLAH RUANG RAPAT	4 RUANGAN
7	JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN	1 RUANGAN
8	KENDARAAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4	32 UNIT
9	KENDARAAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2	6 UNIT

## PROFIL BMN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



NO	DESKRIPSI	EKSISTING
10	KENDARAAN FUNGSIONAL JEMPUTAN	3 UNIT
11	PC UNIT	237 UNIT
12	LAPTOP	32 UNIT
13	LCD PROJECTOR	20 UNIT
14	PRINTER	112 UNIT
15	SCANNER	16 UNIT
16	SERVER	7 UNIT
17	TRANSFORMATOR	1 UNIT
18	GENERATING SET	1 UNIT

## JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	NAMA	JUMLAH
1	PEGAWAI DITJEN PP	241 ORANG
2	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN PP	102 ORANG
3	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)	33 ORANG
4	JUMLAH JFT PERANCANG PUU PUSAT, KL, KANWIL DAN PEMDA	1571 ORANG



# JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JUMLAH PEGAWAI		KETERANGAN
	PIMTI MADYA, PIMTI PRATAMA, ADMINISTRATOR/KOORDINATOR, PENGAWAS/SUBKOORDINATOR		
1	PIMTI MADYA		1 Orang
	L	P	
	1	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
2	PIMTI PRATAMA		7 Orang
	L	P	
	4	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>8 Orang</b>
3	ADMINISTRATOR (ES III)		3 Orang
	L	P	
	2	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	
4	PENGAWAS (ES IV)		8 Orang
	L	P	
	3	5	
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>11 Orang</b>
5	KOORDINATOR (SEBAGAI FUNGSIONAL)		23 Orang
	L	P	
	12	11	
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>	
6	SUBKOORDINATOR (SEBAGAI FUNGSIONAL)		53 Orang
	L	P	
	25	28	
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>76 Orang</b>

# JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JFT (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)									160 Orang	
7	<b>JFT PERANCANG PUU DI DITJEN PP</b>									102 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	10	5	21	29	17	15	5	0		
	15		50		32		5			
<b>JUMLAH</b>		<b>102</b>								
8	<b>JFT ANALIS HUKUM</b>									18 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	4	7	3	1	2	1	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>							
9	<b>JFT ANALIS KEPEGAWAIAN</b>									8 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	3	-	-	4	-	1	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>							
10	<b>JFT ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN</b>									3 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	-	2	-	1	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>							
11	<b>JFT ANALIS KEBIJAKAN</b>									1 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	-	-	-	-	1	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>							
12	<b>JFT ANALIS ANGGARAN PERTAMA</b>									1 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	1	-	-	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>							

# JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13	<b>JFT ARSIPARIS</b>									4 Orang
	AHLI TERAMPIL		AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	1	-	-	3	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>							
14	<b>JFT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA</b>									4 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	1	2	1	-	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>							
15	<b>JFT PENERJEMAH</b>									6 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	1	1	1	2	-	1	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>							
16	<b>JFT PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT</b>									6 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	1	1	2	1	1	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>							
17	<b>JFT PRANATA KOMPUTER</b>									6 Orang
	AHLI TERAMPIL		AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	1	-	2	2	-	1	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>							
18	<b>JFT PUSTAKAWAN</b>									1 Orang
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	-	-	1	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>							

# JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	<b>JFU</b>		<b>63 Orang</b>
	<b>ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER</b>		
19	L	P	2 Orang
	0	2	
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		
	<b>ANALIS HUKUM</b>		
20	L	P	29 Orang
	17	12	
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>		
	<b>ANALIS KERJASAMA</b>		
21	L	P	2 Orang
	1	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		
	<b>ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>		
22	L	P	1 Orang
	-	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		
	<b>ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
23	L	P	1 Orang
	1	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		
	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT</b>		
24	L	P	1 Orang
	1	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		
	<b>BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT</b>		
25	L	P	1 Orang
	-	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		
	<b>KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA</b>		
26	L	P	1 Orang
	-	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		

## JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

27	<b>PENATA KEUANGAN</b>		2 Orang
	L	P	
	1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	
28	<b>PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA</b>		1 Orang
	L	P	
	-	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
30	<b>PENGELOLA KEUANGAN</b>		3 Orang
	L	P	
	1	2	
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	
31	<b>PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA</b>		1 Orang
	L	P	
	1	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
32	<b>PENGELOLA TATA NASKAH</b>		1 Orang
	L	P	
	-	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
33	<b>PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>		1 Orang
	L	P	
	1	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
34	<b>PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN</b>		1 Orang
	L	P	
	-	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	

# JUMLAH PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

35	<b>PENYUSUN INFORMASI HUKUM</b>				2 Orang
	L			P	
	-			2	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>			
36	<b>PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI</b>				7 Orang
	L			P	
	2			5	
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>			
37	<b>PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN</b>				1 Orang
	L			P	
	-			1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>			
38	<b>PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI</b>				1 Orang
	L			P	
	-			1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>			
39	<b>TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>				2 Orang
	L			P	
	1			1	
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>			
40	<b>PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS</b>				1 Orang
	L			P	
	1			-	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>			
41	<b>ANALIS PERMASALAHAN HUKUM</b>				1 Orang
	L			P	
	-			1	
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>			
<b>JUMLAH PEGAWAI DITJEN PP</b>					<b>241 ORANG</b>

JUMLAH PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

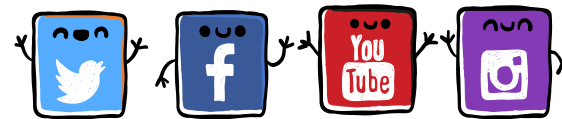
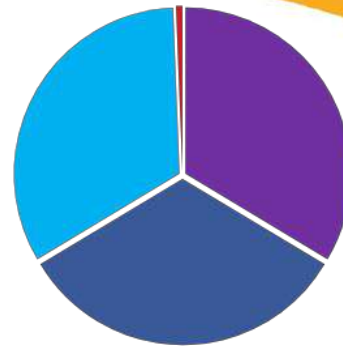
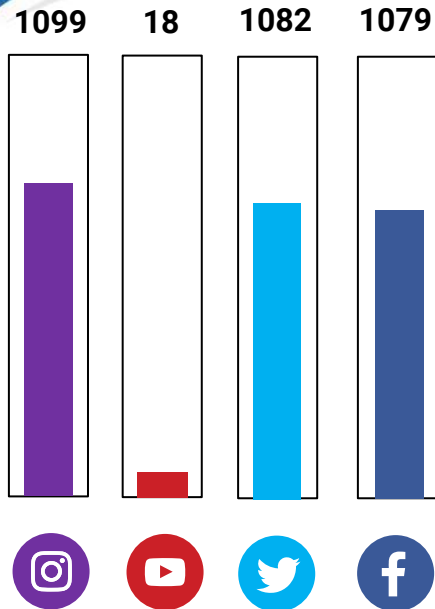
1	PPNPN		33 Orang
	L	P	
	32	1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	

# JUMLAH PERANCANG PUU DI UNIT KERJA ESELON I LAINNYA KEMENKUMHAM, KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN SERTA PEMDA

JFT PERANCANG PUU DI UK ES I KEMENKUMHAM (Selain DITJEN PP)										51 Orang
AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
L	P	L	P	L	P	L	P			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42		8			1		0			
<b>JUMLAH</b>		<b>52</b>								
JFT PERANCANG PUU DI KANWIL KEMENKUMHAM										633 Orang
AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
L	P	L	P	L	P	L	P			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268		295			70		0			
<b>JUMLAH</b>		<b>633</b>								
JFT PERANCANG PUU DI KEMENTERIAN										456 Orang
AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
L	P	L	P	L	P	L	P			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170		220			64		2			
<b>JUMLAH</b>		<b>453</b>								
JFT PERANCANG PUU DI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN										147 Orang
AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
L	P	L	P	L	P	L	P			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47		52			47		1			
<b>JUMLAH</b>		<b>147</b>								
JFT PERANCANG PUU DI PEMERINTAH DAERAH										182 Orang
AHLI PERTAMA		AHLI MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
L	P	L	P	L	P	L	P			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125		52			5		0			
<b>JUMLAH</b>		<b>180</b>								
<b>JUMLAH JFT PERANCANG PUU PUSAT, KL, KANWIL DAN PEMDA</b>										<b>1571 ORANG</b>



## JUMLAH POSTINGAN MEDIA SOSIAL JANUARI – DESEMBER 2022



Twitter

Facebook

YouTube

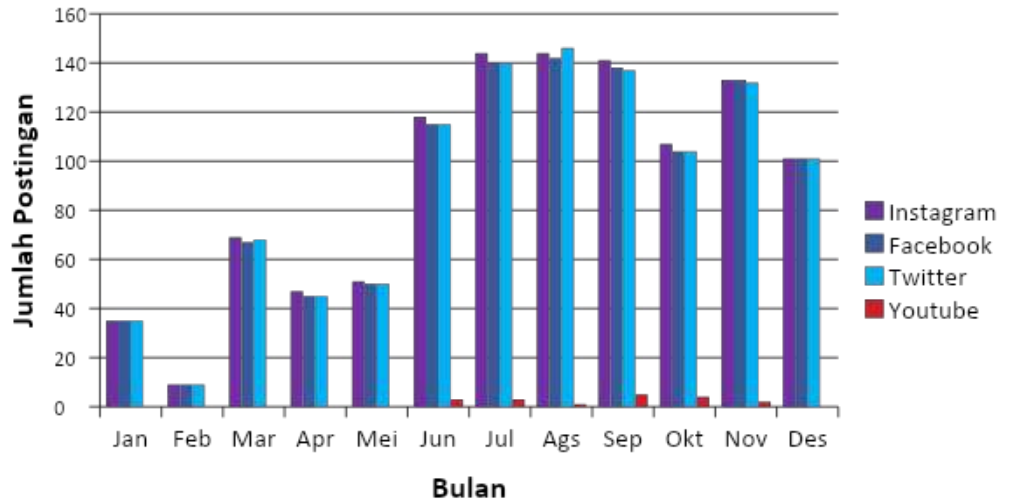
Instagram

@djppkemenkumham

djpp.kemenkumham

Data pertanggal 26 Desember 2022

## GRAFIK POSTINGAN MEDIA SOSIAL PER BULAN



\*25.000 Jumlah *audience* (Viewers, Likers, Followers, & Subscribers)

Data pertanggal 26 Desember 2022

# OPERA (OBROLAN PERANCANG) AGUSTUS – DESEMBER 2022



## Episode 1

Nara Sumber : Eddy Hiarij  
12 Agustus 2022

KUHP Nasional sebagai bentuk  
Kemandirian di  
Bidang Hukum Pidana Indonesia

## Episode 2

Nara Sumber : Sony M. Sikumbang  
06 September 2022

Adopsi Metode RIA dan Teori ROCCIPI dalam  
Penyusunan Naskah Akademik



## Episode 3

Nara Sumber : Dhahana Putra  
15 September 2022

Digitalisasi dalam Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

## Episode 4

Nara Sumber : Reza F.  
Febriansyah  
29 September 2022

Urgensi dan Prospek Pengaturan Analisis  
Evaluasi Hukum



# OPERA (OBROLAN PERANCANG) AGUSTUS – DESEMBER 2022



## Episode 5

Nara Sumber : Tasya Safiranita  
27 Oktober 2022

NFT sebagai Objek Kekayaan Intelektual  
dalam Perspektif *Cyber Law*



## Episode 7

Nara Sumber : Topo Santoso  
14 November 2022

Pasal Menyatakan Diri Memiliki Kekuatan  
Gaib dalam RUU KUHP



## Episode 6

Nara Sumber : I Ketut Hadi Priatna  
09 November 2022

Menjelang Dua Tahun Berlakunya  
Undang-undang tentang Cipta Kerja



## Episode 8

Nara Sumber : Wicipto Setiadi  
22 November 2022

Implikasi Pengujian Formil Undang-undang dalam  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



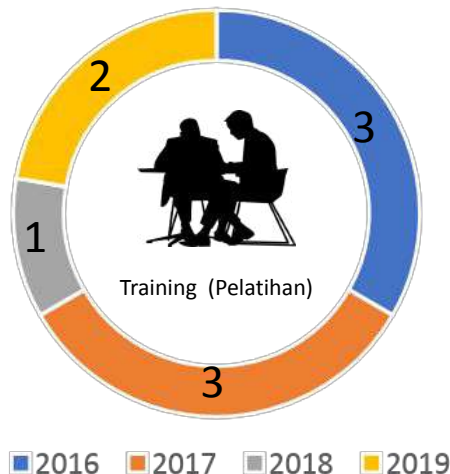
# KERJA SAMA LUAR NEGERI

*DITJEN PP DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)*

- **PROYEK 1 (2015-2020) - TRAINING**

*PROJECT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION AND LEGAL CONSISTENCY FOR IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT*

Tahun	Training	Lokasi
2016	KCCP 1	OSAKA
2016	KCCP 2	TOKYO
2016	KCCP 3	TOKYO
2017	KCCP 4	OSAKA
2017	KCCP 5	TOKYO & OSAKA
2017	KCCP 6	TOKYO
2018	KCCP 7	TOKYO
2019	KCCP 8	TOKYO & KYOTO
2019	KCCP 9	TOKYO



# KERJA SAMA LUAR NEGERI

*DITJEN PP DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)*

- **PROYEK 1 (2015-2020) – KUNJUNGAN & SEMINAR**

*PROJECT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION AND LEGAL CONSISTENCY FOR IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT*

TAHUN	VISIT
2017	3 KUNJUNGAN
2018	5 KUNJUNGAN
2019	3 KUNJUNGAN
2020	1 KUNJUNGAN



# KERJA SAMA LUAR NEGERI

*DITJEN PP DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)*

DUKUNGAN KERJA SAMA DALAM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL



FGD



**(diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019)**



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (PUU)



# KERJA SAMA LUAR NEGERI

*DITJEN PP DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)*

BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT DAN SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH





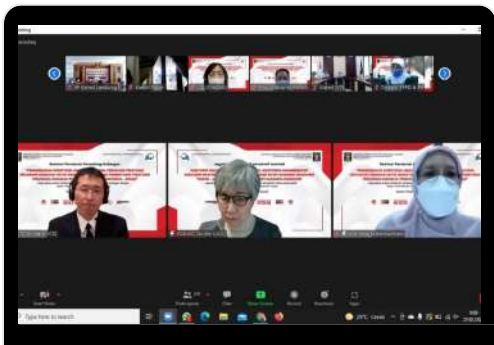
# KERJA SAMA LUAR NEGERI

*DITJEN PP DENGAN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)*



- PROYEK 2 JANUARI – DESEMBER 2022

*PROJECT FOR EFFICIENT AND FAIR DISPUTES RESOLUTION MECHANISM AND LEGISLATIVE DRAFTING CAPACITY DEVELOPMENT FOR IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT*



SEMINAR DIHADIRI OLEH PERWAKILAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA, 33 KANWIL KEMENKUMHAM, DAN 33 PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA.

SEMILAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEMASTIKAN KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA – JEPANG” BERSAMA MR. SHINTARO NAITO

## 1 ST JOINT COORDINATION COMMITTEE (JCC) 2022



WAKTU: 23 AGUSTUS 2022

TEMPAT: HOTEL RAFFLES JAKARTA

AUDIENSI MR. SHINTARO NAITO, *DIRECTOR ICD (INTERNATIONAL COOPERATION DEPARTMENT)* DAN TIM KE INDONESIA



KUNJUNGAN KE UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN DR. FITRIANI AHLAN SJARIF, S.H., M.H. (DOSEN FH UI)



KUNJUNGAN KE DAERAH (*OBSERVATION VISIT*) KE KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, UNIVERSITAS GADJAH MADA, LAPAS PEREMPUAN II B YOGYAKARTA, DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA



KUNJUNGAN KE DAERAH (*OBSERVATION VISIT*) KE KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI BALI DAN SEMINAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI HOTEL THE TRANS RESORT BALI (NARASUMBER: DR. JIMMY USFUNAN, MR. SHINTARO NAITO, DAN MS. SHOJI)



DISKUSI DENGAN PERANCANG PUU KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI BALI



KUNJUNGAN KE BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSPDM) HUKUM DAN HAM

## PENERIMA BEASISWA KYUSHU UNIVERSITY

PERIODE 1 OKTOBER 2022 - 30 SEPTEMBER 2024

### ***"11th Batch of Knowledge Co-Creation Program (Long-Term on Legal and Judicial Human Resources Development (JFY 2022))"***

Beasiswa magister hukum (S2) di Jepang



Melissa Yohana



Melita Berlina Meliala

## PENERIMA SHORT COURSE

PERIODE JANUARI 2023, TOKYO, JEPANG

***Training (Short Course) Enhancing  
Policy and Practice in the Field of  
Crime Prevention and Criminal Justice  
(Senior Seminar)***



***Lina Widiyastuti, S.H., M.H.,  
L.LM.***

## RAPAT PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN JABATAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA



PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA OLEH TIM POKJA MELIBATKAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEJABAT FUNSIONAL LAIN YANG BERKOMPETEN MELALUI KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PELATIHAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA YANG DITETAPKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TELAH DILAKSANAKAN 6 KALI RAPAT



# DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### TUGAS

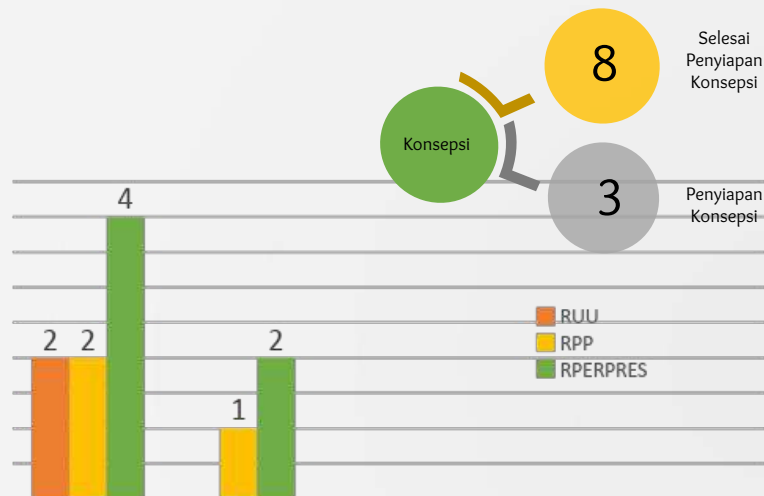
1. PENYIAPAN PERUMUSAN RANCANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERENCANAAN, PENYIAPAN KONSEPSI, PENYUSUNAN, DAN EVALUASI DI BIDANG PERENCANAAN PENYUSUNAN RUU, RPERPPU, PRR, DAN RPERPRES YANG MENJADI LINGKUP TUGAS KEMENKUMHAM SERTA RPERMENKUMHAM

2. PENYIAPAN RANCANGAN KEBIJAKAN TEKNIS, PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG PENYUSUNAN RUU, RPERPPU, PRR, DAN RPERPRES YANG MENJADI LINGKUP TUGAS KEMENKUMHAM, SERTA PENYELARASAN RPERMENKUMHAM

3. PENYIAPAN DATA, BAHAN, DAN PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN MAUPUN DARI DPR YG MENJADI LINGKUP/BIDANG TUGAS KEMENKUMHAM

4. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN

# KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Rancangan PUU	Selesai Penyiapan Konsep	Penyiapan Konsep	Selesai PAK	Dikembalikan ke Menteri	Telah diundangkan	Jumlah
2 RUU	2	0	0	0	0	2
3 RPP	2	1	0	0	0	3
6 RPerpres	4	2	0	0	0	6
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

## Peraturan yang selesai Penyiapan Konsep

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for The Extradition of Fugitives*)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

RPP tentang Tata Acara Penanganan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama

RPP tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Beserta Anggota Keluarga

RPerpres tentang Sistem Penyuluhan Hukum

RPerpres tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*

RPerpres tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

RPerpres tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



# PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## Peraturan yang telah Diundangkan

RPP Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak dengan PP Nomor 58 Tahun 2022

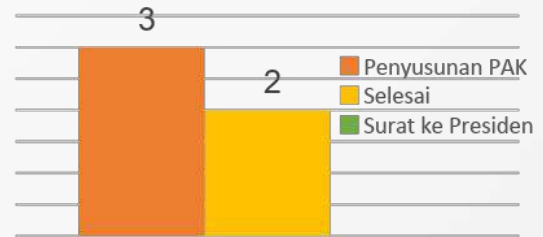
RPP Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dengan PP Nomor 56 Tahun 2022

RPerpres tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2022

# RINCIAN DATA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

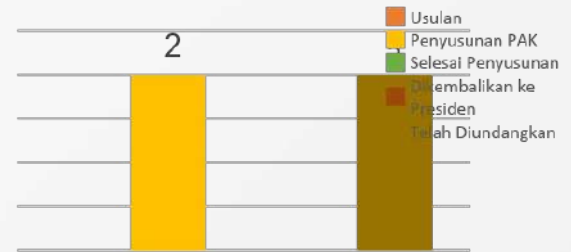
## I. PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

JUMLAH RUU	PENYUSUNAN PAK	SELESAI PENYUSUNAN	SELESAI (SURAT KE PRESIDEN)
5 PENYUSUNAN RUU	3	2	0



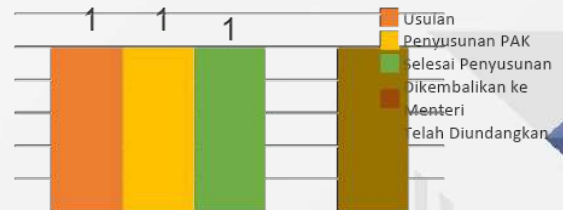
## II. PENYUSUNAN RANCANGAN PEMERINTAH (RPP)

JUMLAH RPP	USULAN/ PERSIAPAN PAK	PENYUSUNAN PAK	SELESAI PENYUSUNAN	DIKEMBALIKAN KE PRESIDEN	TELAH DIUNDANGKAN
4 PENYUSUNAN RPP	0	2	0	0	2



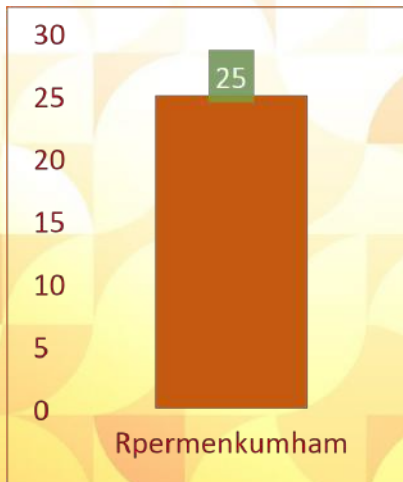
## III. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (RPERPRES)

JUMLAH RPERPRES	USULAN/ PERSIAPAN PAK	PENYUSUNAN PAK	SELESAI PENYUSUNAN	DIKEMBALIKAN KE MENTERI	TELAH DIUNDANGKAN
4 PENYUSUNAN RPERPRES	1	1	1	0	1



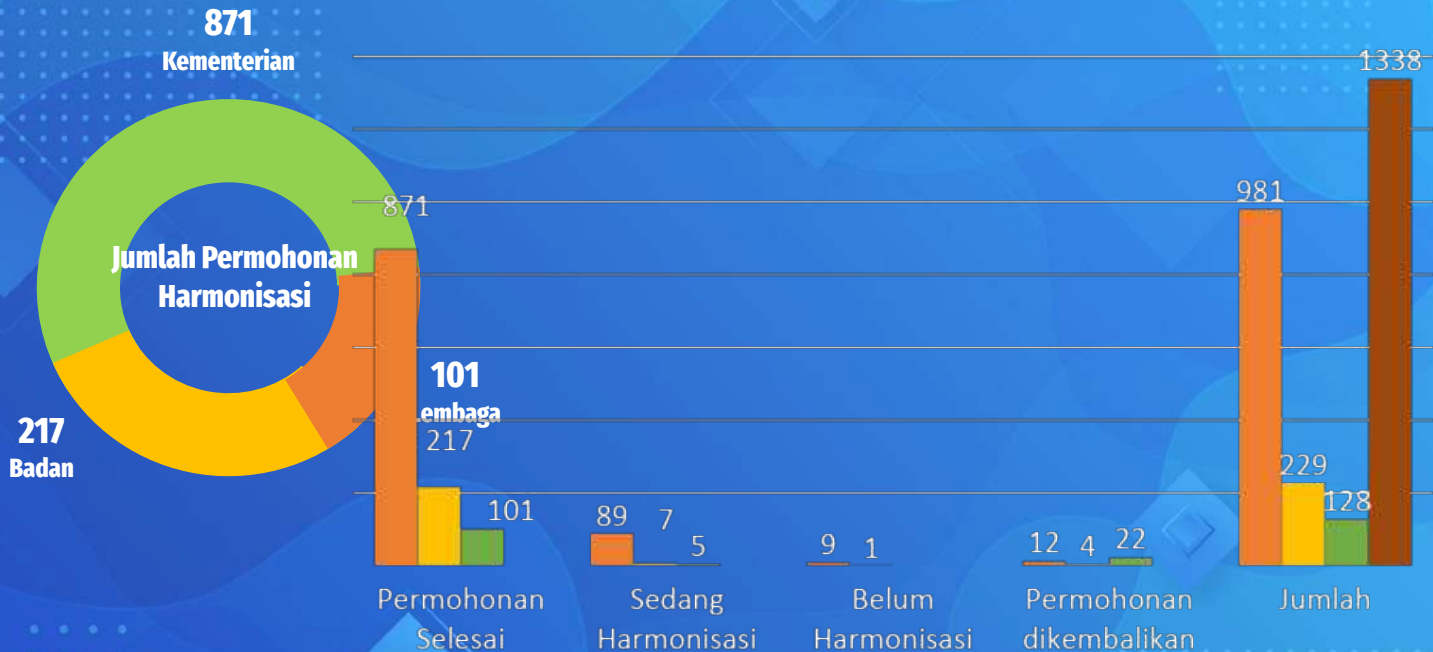
# PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM

URAIAN	JUMLAH
PENYELARASAN RPERMENKUMHAM	25



- 1 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
- 2 RPERMENKUMHAM TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
- 3 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
- 4 RPERMENKUMHAM TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
- 5 RPERMENKUMHAM TENTANG FASILITAS KARTU ELEKTRONIK SISTEM PERLINTASAN KEIMIGRASIAN (ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM FOR IMMIGRATION CARD) DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
- 6 RPERMENKUMHAM TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PELATIHAN JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 7 RPERMENKUMHAM TENTANG TATA CARA DAN SYARAT KHUSUS PEMENUHAN PERMINTAAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
- 8 RPERMENKUMHAM TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
- 9 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 10 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
- 11 RPERMENKUMHAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
- 12 RPERMENKUMHAM TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SERTA SEKRETARIAT PANITIA NASIONAL RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
- 13 RPERMENKUMHAM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
- 14 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG CAP KEIMIGRASIAN
- 15 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 16 RPERMENKUMHAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 17 RPERMENKUMHAM TENTANG PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA, PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN, DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN AKIBAT STATUS KEWARGANEGARAAN
- 18 RPERMENKUMHAM TENTANG KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU APARAT PENGAWASAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 19 RPERMENKUMHAM TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 20 RPERMENKUMHAM TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- 21 RPERMENKUMHAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN
- 22 RPERMENKUMHAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAN PEMASYARAKATAN
- 23 RPERMENKUMHAM TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
- 24 RPERMENKUMHAM TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 25 RPERMENKUMHAM TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

# HARMONISASI PERATURAN KEMENTERIAN / BADAN / LEMBAGA



# PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG - UNDANG

1 RUU Menunggu Surat Presiden

2 RUU dalam Tahap Pembahasan

1 RUU Sudah Disahkan

3 RUU Sudah Diundangkan

## MENUNGGU SURAT PRESIDEN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

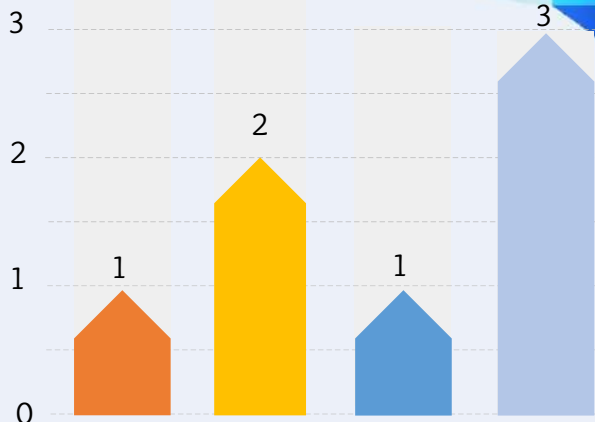
## PERATURAN DALAM TAHAP PEMBAHASAN

RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## SUDAH DISAHKAN

RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*)



## PERATURAN YANG SUDAH DIUNDANGKAN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (CARRY OVER): SUDAH DIUNDANGKAN DENGAN UU NO 22 TAHUN 2022

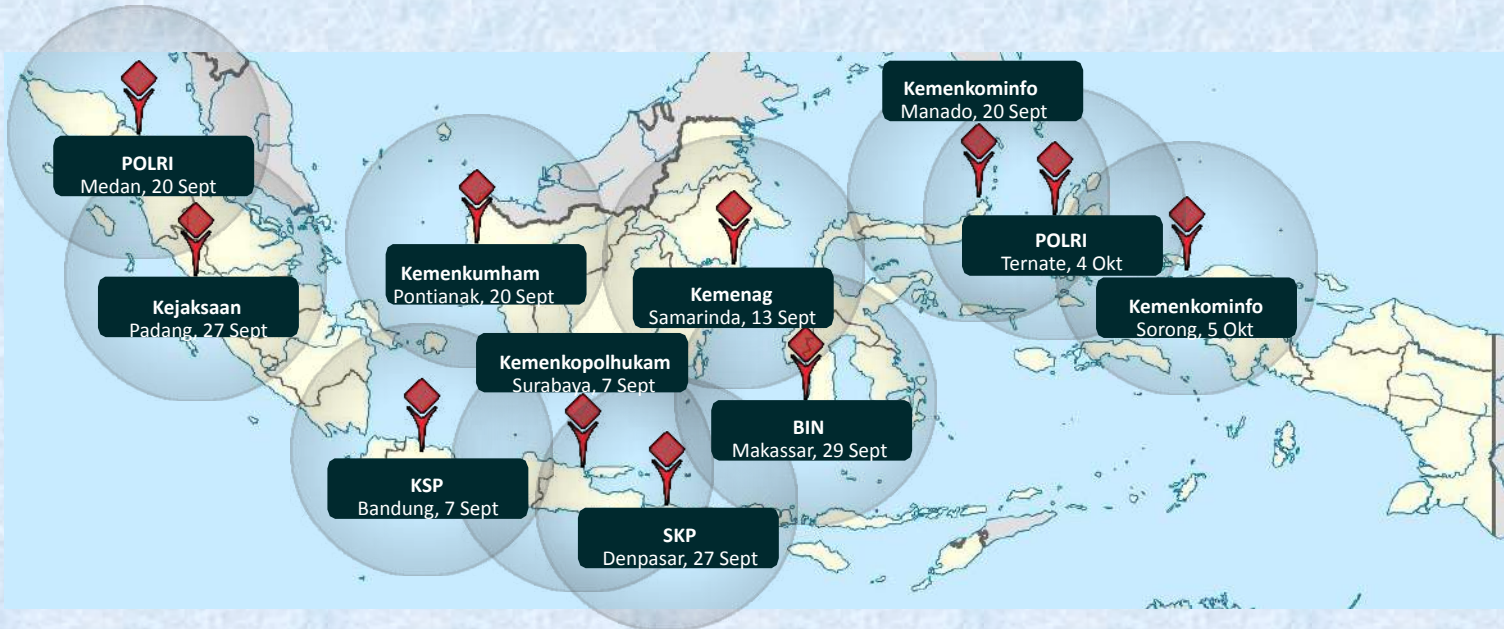
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : SUDAH DIUNDANGKAN DENGAN UU NOMOR 13 TAHUN 2022

RUU KUHP SUDAH DIUNDANGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023

## DIALOG PUBLIK RUU KUHP

ATAS ARAHAN PRESIDEN RI DAN DIDASARI  
PADA PUTUSAN MK 91/PUU-XVIII/2020,  
PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN  
DIALOG PUBLIK UNTUK MENJAMIN  
*MEANINGFUL PUBLIC PARTICIPATION*  
DALAM PEMBENTUKAN RUU KUHP

# DIALOG PUBLIK RUU KUHP





# DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I







## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, KEAMANAN, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

### TUGAS

1. PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HANKAM, HUKUM, HAM, APARATUR NEGARA, DAN KESRA

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HANKAM, HUKUM, HAM, APARATUR NEGARA, DAN KESRA

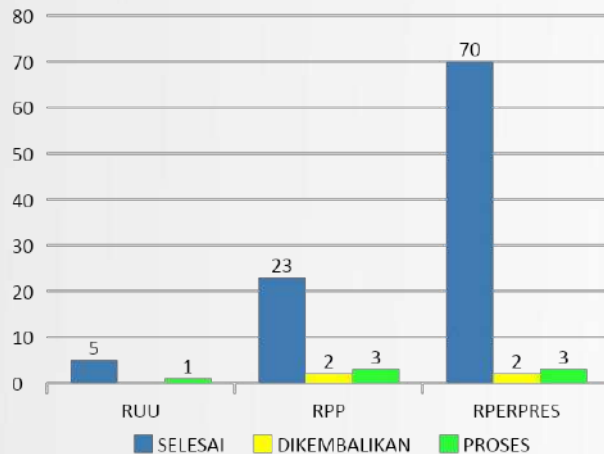
3. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HANKAM, HUKUM, HAM, APARATUR NEGARA, DAN KESRA

4. PELAKSANAAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HANKAM, HUKUM, HAM, APARATUR NEGARA, DAN KESRA

5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HARMONISASI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, HANKAM, HUKUM, HAM, APARATUR NEGARA, DAN KESRA

6. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN

## TOTAL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES

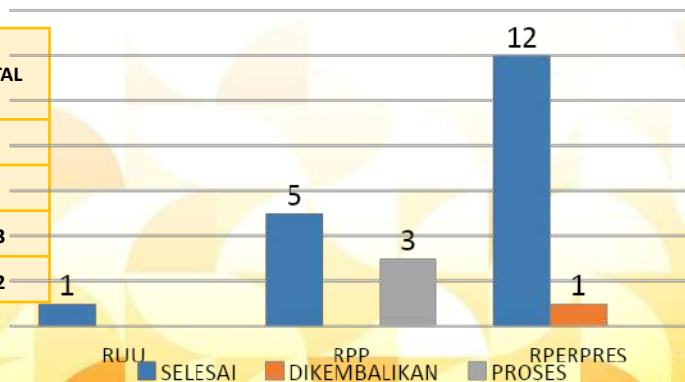


NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	5	0	1	6
2.	RPP	23	2	3	28
3.	RPERPRES	70	2	2	74
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>108</b>

Data pertanggal 30 Desember 2022

## PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

N O	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	1	0	0	1
2.	RPP	5	0	3	8
3.	RPERPRES	12	1	0	13
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>22</b>



Data pertanggal 30 Desember 2022

# PERATURAN YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN PADA BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

## RPP

RPP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

RPP TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM  
RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA  
NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA NUSANTARA

RPP TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

RPP TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN/ATAU JASA  
TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK

RPP TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH  
DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

## RUU

RUU PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PRB ATAS UU  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU MENJADI UNDANG-UNDANG  
PEMILU MENJADI UNDANG-UNDANG

## RPERPRES

RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE  
SETTLEMENT MECHANIS* (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN  
SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN)

RPERPRES TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUB BIDANG URUSAN ENERGI BARU  
TERBARUKAN

RPERPRES TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

RPERPRES TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU  
KOTA NUSANTARA

RPERPRES TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA

RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU  
KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042

RPERPRES TENTANG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI  
KHUSUS PAPUA

RPERPRES TENTANG RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN  
2022-2041

RPERPRES TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

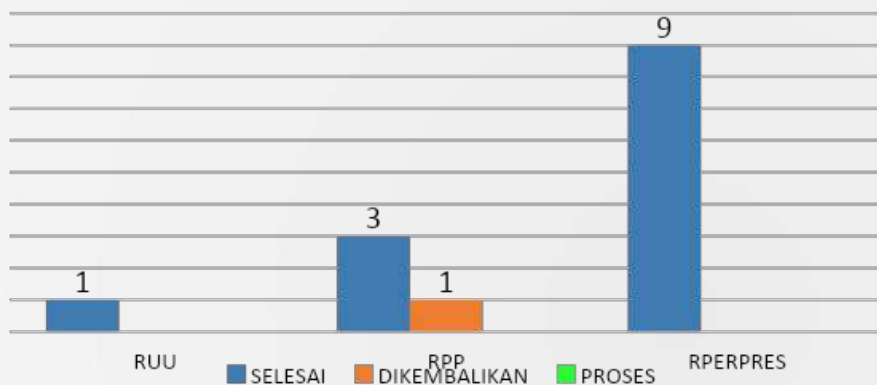
RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN  
2020 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *NICE AGREEMENT CONCERNING THE  
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF  
THE REGISTRATION OF MARKS* (PERSETUJUAN NICE MENGENAI KLASIFIKASI  
INTERNASIONAL ATAS BARANG DAN JASA UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN MEREK)

RPERPRES TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES

## BIDANG PERTAHANAN & KEAMANAN



### PERATURAN YANG SELESAI HARMONISASI

RUU TENTANG PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN

RPP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

RPP TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

RPP TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	1	0	0	1
2.	RPP	3	1	0	4
3.	RPERPRES	9	0	0	9
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Data pertanggal 30 Desember 2022



## RPERPRES YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. RPERPRES TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU
3. RPERPRES TENTANG STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS NASIONAL
4. RPERPRES TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA
5. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
6. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
7. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
8. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
9. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES  
 BIDANG HUKUM DAN HAM

Peraturan yang selesai Harmonisasi

RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*)

RUU TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

RUU TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS, INCLUDING DIPLOMATIC AGENTS* (KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMIDANAAN KEJAHATAN TERHADAP ORANG YANG DILINDUNGI SECARA INTERNASIONAL, TERMASUK AGEN DIPLOMATIK)

RPP TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN

RPP TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

RPP TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN

RPP TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

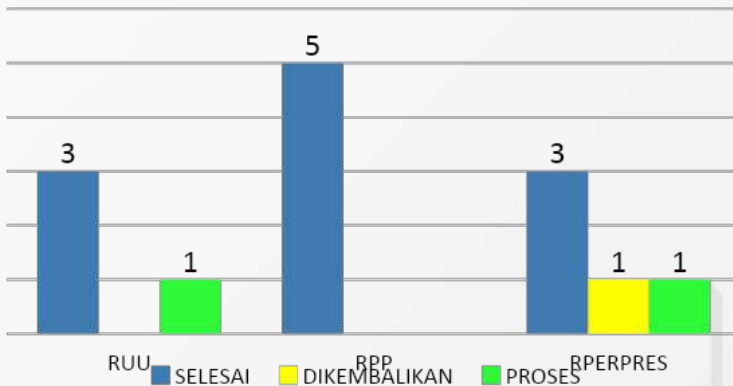
RPP TENTANG PEMBIAYAAN KESEHATAN

RPERPRES TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

RPERPRES TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	3	0	1	4
2.	RPP	5	0	0	5
3.	RPERPRES	3	1	1	5
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

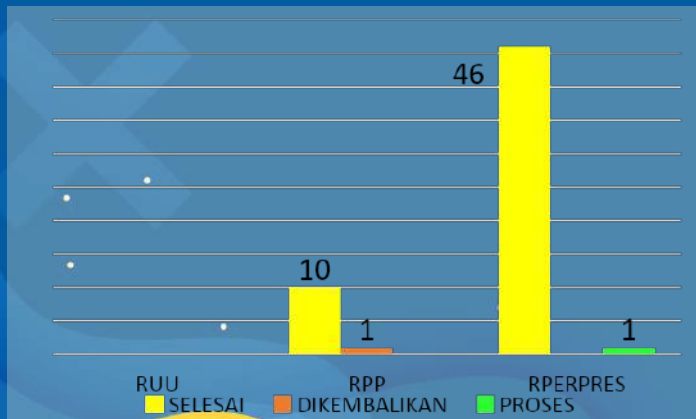


Data pertanggal 30 Desember 2022



# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG SDM, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

N O	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	0	0	0	0
2.	RPP	10	1	0	11
3.	RPERPRES	46	0	1	47
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>58</b>



Data pertanggal 30 Desember 2022

## RPP YANG SELESAI HARMONISASI

RPP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

RPP TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

RPP TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

RPP TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

RPP TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS TERBUKA

RPP TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

RPP TENTANG PENYELENGGARAAN PENSIARAN LEMBAGA PENSIARAN PUBLIK

RPP TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022

RPP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN



# RPERPRES YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG SDM, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
2. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
3. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
4. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
5. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
6. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
7. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
8. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
9. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
10. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (PENATA KKB)
11. RPERPRES TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
12. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM PRAKERJA
13. RPERPRES TENTANG UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
14. RPERPRES TENTANG UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBOK BUKITTINGGI
15. RPERPRES TENTANG UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
16. RPERPRES TENTANG UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
17. RPERPRES TENTANG UIN SALATIGA
18. RPERPRES TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
19. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
20. RPERPRES TENTANG PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022
21. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
22. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
23. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

## RPERPRES YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG SDM, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

24. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
25. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN ANALIS STANDARDISASI
26. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN METROLOGI
27. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
28. RPERPRES TENTANG SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN
29. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEMBINA INDUSTRI
30. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN
31. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK
32. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
33. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
34. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
35. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA
36. RPERPRES TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN PENGARAH DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
37. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUIKASI
38. RPERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
39. RPERPRES TENTANG BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
40. RPERPRES TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH
41. RPERPRES TENTANG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
42. RPERPRES TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
43. RPERPRES TENTANG HARI DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI ASN
44. RPERPRES TENTANG HAK KEUANGAN, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS
45. RPERPRES TENTANG TENTANG BADAN KARANTINA INDONESIA
46. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PANGAN NASIONAL



# DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II





## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG HARMONISASI RANCANGAN PUU BIDANG PEREKONOMIAN

### TUGAS

1. PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG PEREKONOMIAN

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG PEREKONOMIAN

3. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG PEREKONOMIAN

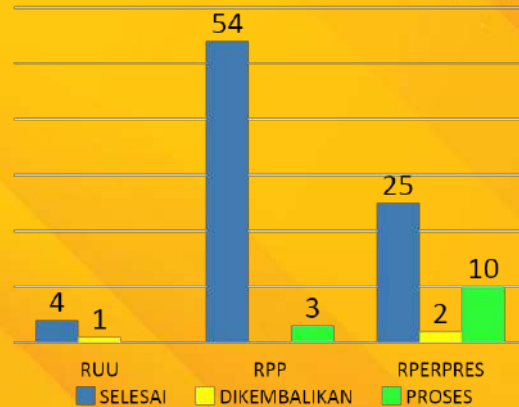
4. PELAKSANAAN HARMONISASI PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG PEREKONOMIAN

5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HARMONISASI RUU, RPERPPU, RPP, DAN RPERPRES DI BIDANG PEREKONOMIAN

6. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN

## TOTAL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES

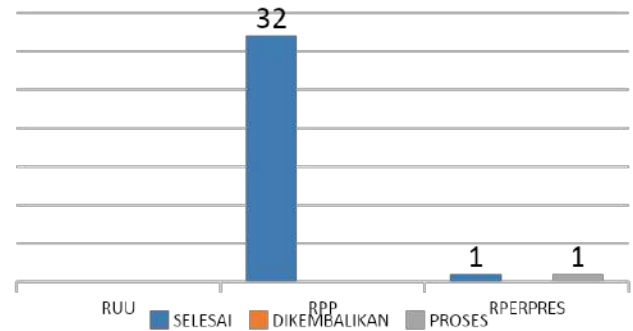
NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	4	1	0	5
2.	RPP	54	0	3	57
3.	RPERPRES	25	2	10	37
	<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>99</b>



Data pertanggal 30 Desember 2022

## PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BUMN, DAN PENANAMAN MODAL

NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	0	0	0	0
2.	RPP	32	0	0	32
3.	RPERPRES	1	0	1	2
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>



### RPerpres yang selesai Harmonisasi

RPERPRES TENTANG PERCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANIL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)

Data pertanggal 30 Desember 2022

## RPP YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BUMN, DAN PENANAMAN MODAL

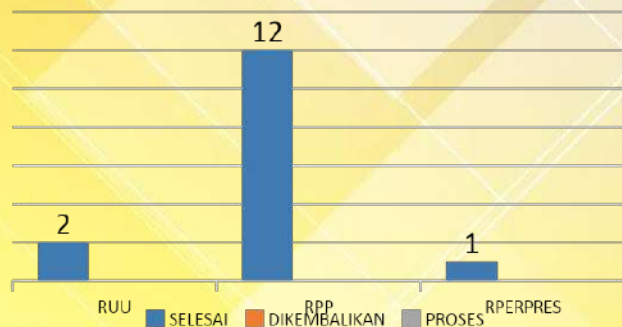
1. RPP TENTANG KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA PERUSAHAAN EFEK
2. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA (NON TUNAI PMPP)
3. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (TUNAI APBN)
4. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (TUNAI APBN)
5. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA TBK (TUNAI APBN)
6. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK (HOLDING SUB-SEMEN)
7. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA TBK (FRESH MONEY)
8. RPP TENTANG PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
9. RPP TENTANG PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) INDUK DI BIDANG PERTAMBANGAN (HOLDING BUMN PERTAMBANGAN)
10. RPP TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
11. RPP TENTANG PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
12. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK
13. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022
14. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (HOLDING PARIWISATA DAN PENDUKUNG TAHAP II)
15. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA TBK (TUNAI APBN)
16. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (TUNAI APBN)

## RPP YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BUMN, DAN PENANAMAN MODAL

17. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PMPP)
18. RPP TENTANG RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA TBK (KONVERSI OWK)
19. RPP TENTANG PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA TBK
20. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI GELAS
21. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA
22. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
23. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH
24. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
25. RPP TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
26. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (TUNAI TAHAP II)
27. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA (PMPP)
28. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PMPP)
29. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA (TUNAI)
30. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL BADAN BANK TANAH (TUNAI)
31. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT SEJAHTERA EKA GRAHA (PMPP)
32. RPP TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PMPP)



# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES - BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL



## Peraturan yang selesai Harmonisasi

RUU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

RUU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

RPERPRES TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSULTANSI NASIONAL

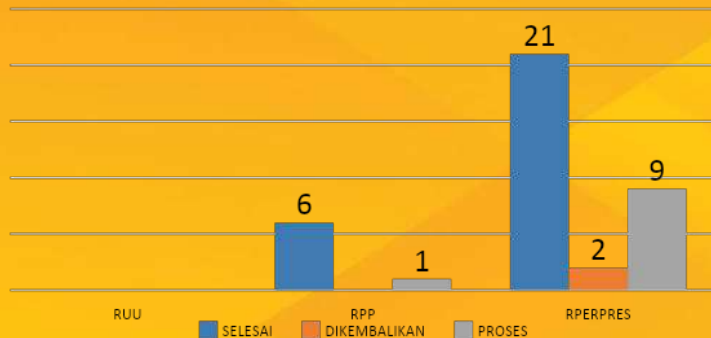
NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	2	0	0	2
2.	RPP	12	0	0	12
3.	RPERPRES	1	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Data pertanggal 30 Desember 2022

## RPP YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL

1. RPP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2. RPP TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN (RPP PELAKSANAAN UU HPP DI BIDANG PPH)
3. RPP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4. RPP TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
5. RPP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
6. RPP TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
7. RPP TENTANG TATA CARA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
8. RPP TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBAHKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN (RPP FASILITAS PPN)
9. RPP TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
10. RPP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL (RPP TARIF PNPB KEMENTERIAN SOSIAL)
11. RPP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (RPP PNPB KEMENKOMINFO)
12. RPP TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN FASILITAS KHUSUS PEMBIAYAAN DI IBU KOTA NUSANTARA

# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG



N O	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	0	0	0	0
2.	RPP	6	0	1	7
3.	RPERPRES	21	2	9	32
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>39</b>

RPP
RPP TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
RPP TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
RPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
RPP TENTANG KONSERVASI ENERGI
RPP TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
RPP TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Data pertanggal 30 Desember 2022



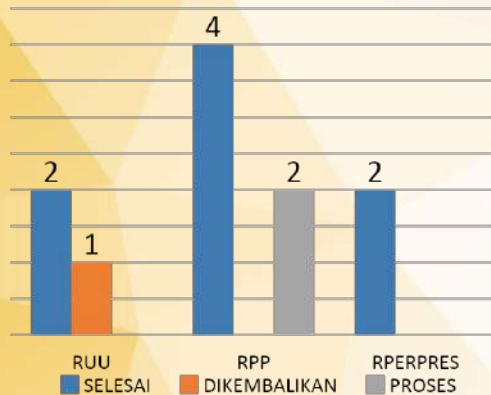
## RPERPRES YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG

1. RPERPRES TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
2. RPERPRES TENTANG BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM
3. RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCHANGE STATIONS* (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN)
4. RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)
5. RPERPRES TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA *FLIGHT INFORMATION REGION* JAKARTA DAN *FLIGHT INFORMATION REGION* SINGAPURA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION AND THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION*)
6. RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *AMANDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER, KIGALI, 2016* (AMANDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016)
7. RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO. 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SUMATERA
8. RPERPRES TENTANG RZ KAW LAUT FLORES
9. RPERPRES TENTANG RZ KAW SELAT MALAKA
10. RPERPRES TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL SUMBER DAYA AIR
11. RPERPRES TENTANG PERAN AKTIF INDONESIA DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

## RPERPRES YANG SELESAI DIHARMONISASIKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG

12. RPERPRES TENTANG RDTR KPN YETETKUN
13. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU LIMBOTO
14. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT
15. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG-BETUNG-INDRALAYA-KAYUAGUNG (RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN RTR KSN PATUNG RAYA AGUNG)
16. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI
17. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN CANDI PRAMBANAN
18. RPERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN LINGKUNGAN HIDUP TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
19. RPERPRES TENTANG PENGESAHAN *ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF INTER-STATE TRANSPORT* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA SAMA ASEAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN ANTARNEGARA)
20. RPERPRES TENTANG PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
21. RPERPRES TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA DIMETIL ETER SEBAGAI BAHAN BAKAR

# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU, RPP, DAN RPERPRES BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI



NO	JENIS RANCANGAN	SELESAI HARMONISASI		PROSES	TOTAL
		SELESAI	DIKEMBALIKAN		
1.	RUU	2	1	0	3
2.	RPP	4	0	2	6
3.	RPERPRES	2	0	0	2
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

## RUU

RUU TENTANG PENGESAHAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)

RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)

## RPP

RPP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

RPP TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI

RPP TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SANUR

RPP TENTANG PERWILAYAHAN INDUSTRI

## RPERPRES

RPERPRES TENTANG PENGESAHAN ASEAN *TRADE IN SERVICES AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN)

RPERPRES TENTANG RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF TAHUN 2022-2042

Data pertanggal 30 Desember 2022



# DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### TUGAS

1. PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI PERANCANGAN PERDA DAN PEMBINAAN PERANCANG

4 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN FASILITASI JF PERANCANG

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI PERANCANGAN PERDA DAN PEMBINAAN PERANCANG

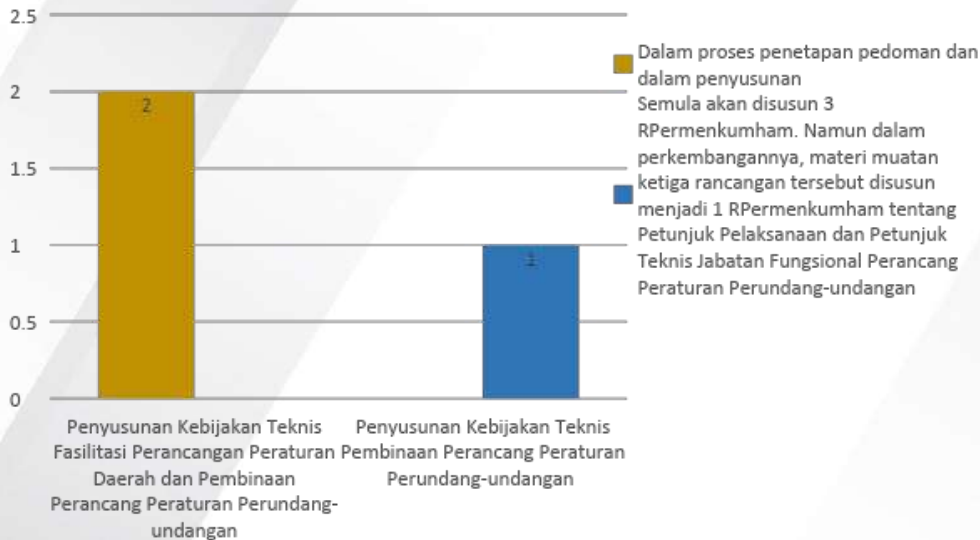
5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG FASILITASI PERDA DAN PEMBINAAN PERANCANG

3. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG FASILITASI PERANCANGAN PERDA DAN PEMBINAAN PERANCANG

6 PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN



## PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI



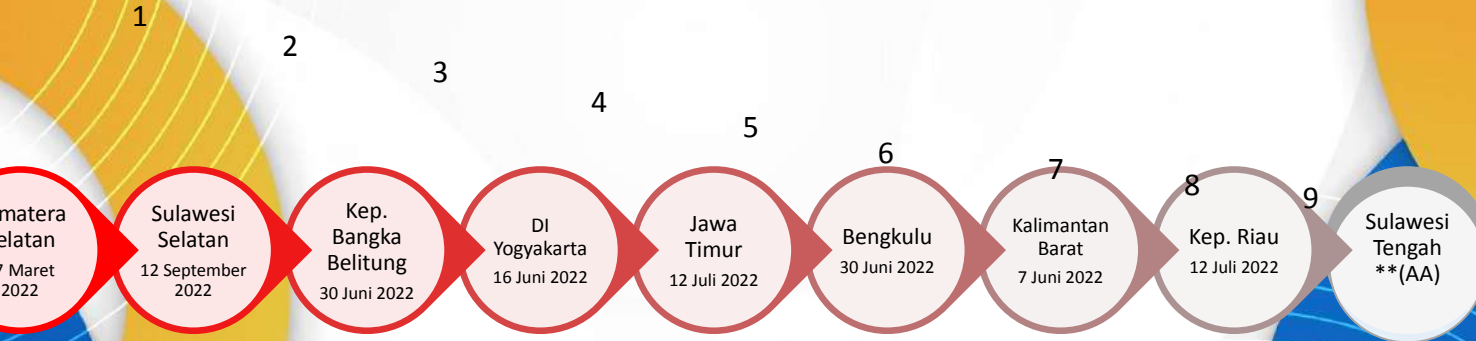
Penyusunan Kebijakan Teknis Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan PUU :

1. Pedoman Pembentukan Perda mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda
2. Kajian mengenai Pembentukan perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan Perancang PUU:

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

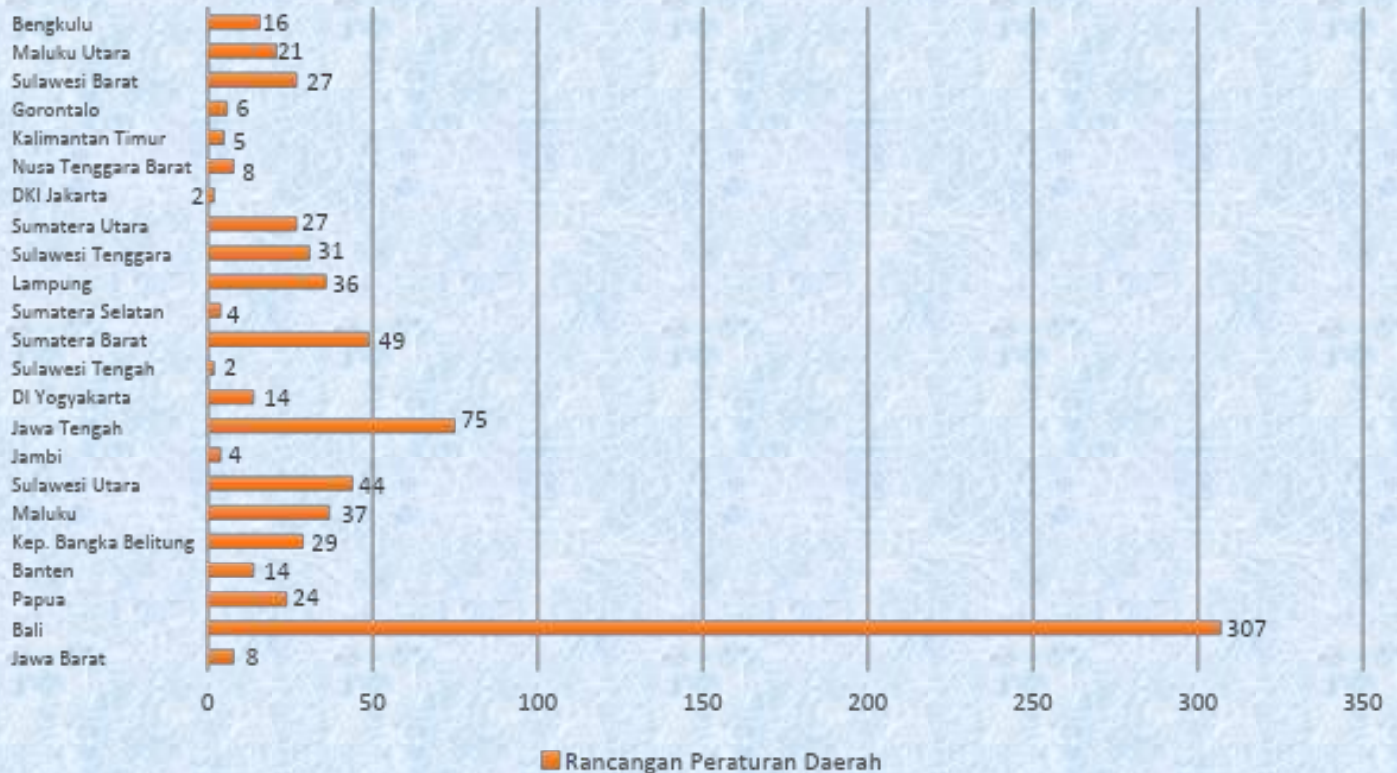
## FASILITASI DAN PEMBINAAN SUBSTANSI PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



Pembinaan Substansi :  
Kanwil mengadakan Kegiatan Penguatan Perancang  
PUU dengan Pemda dan Mengundang Ditjen PP  
sebagai Narasumber dan Pembimbing

**\*\*** Anggaran pada Kanwil Sulteng terkena *Automatic Adjustment* (AA)

## KANTOR WILAYAH YANG MENGIRIMKAN SURAT SELESAI HARMONISASI TAHUN 2022



## KANTOR WILAYAH YANG MENGIRIMKAN SURAT PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

### **Kanwil Bali**

•7 September 2022

### **Kanwil Bali**

•7 September 2022

### **Kanwil Bali**

•7 September 2022

### **Kanwil Bali**

•20 September 2022

### **Kanwil Bali**

•3 Oktober 2022

### **Kanwil Bali**

•3 Oktober 2022

### **Kanwil Bali**

•4 Oktober 2022

### **Kanwil Bali**

•19 Oktober 2022

# PENDAMPINGAN/SUPERVISI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

## Jawa Tengah

- Dilaksanakan tanggal 30 Maret – 1 April 2022

## Bali

- Tidak terlaksana anggaran diblokir

## NTB

- Dilaksanakan 28 Maret – 30 Maret 2022

## Jawa Barat

- Dilaksanakan 13 Juli – 14 Juli 2022

## Lampung

- Dilaksanakan 14 September – 16 September 2022

## Banten

- Dilaksanakan 14 Juli – 15 Juli 2022

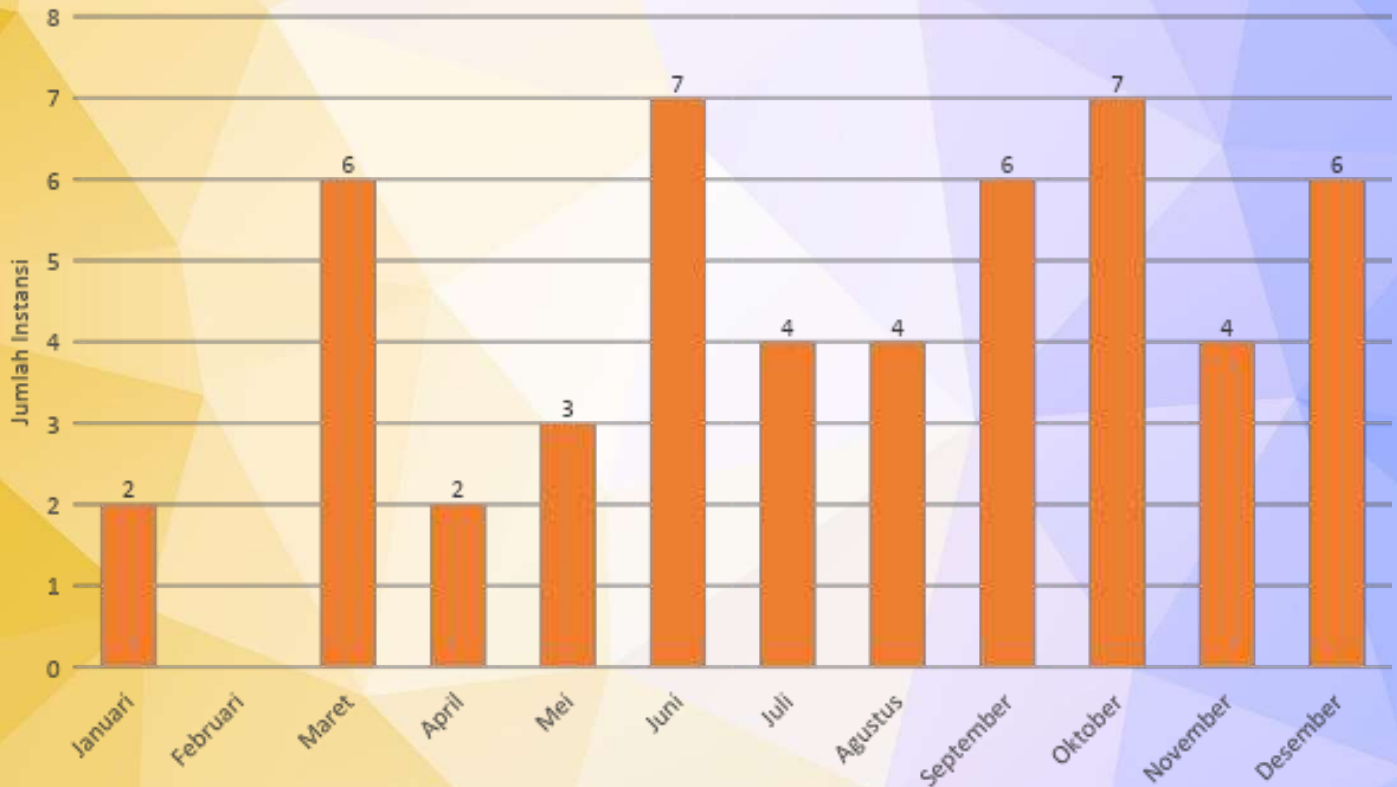
## Sumatera Barat

- Dilaksanakan 24 November – 26 November 2022

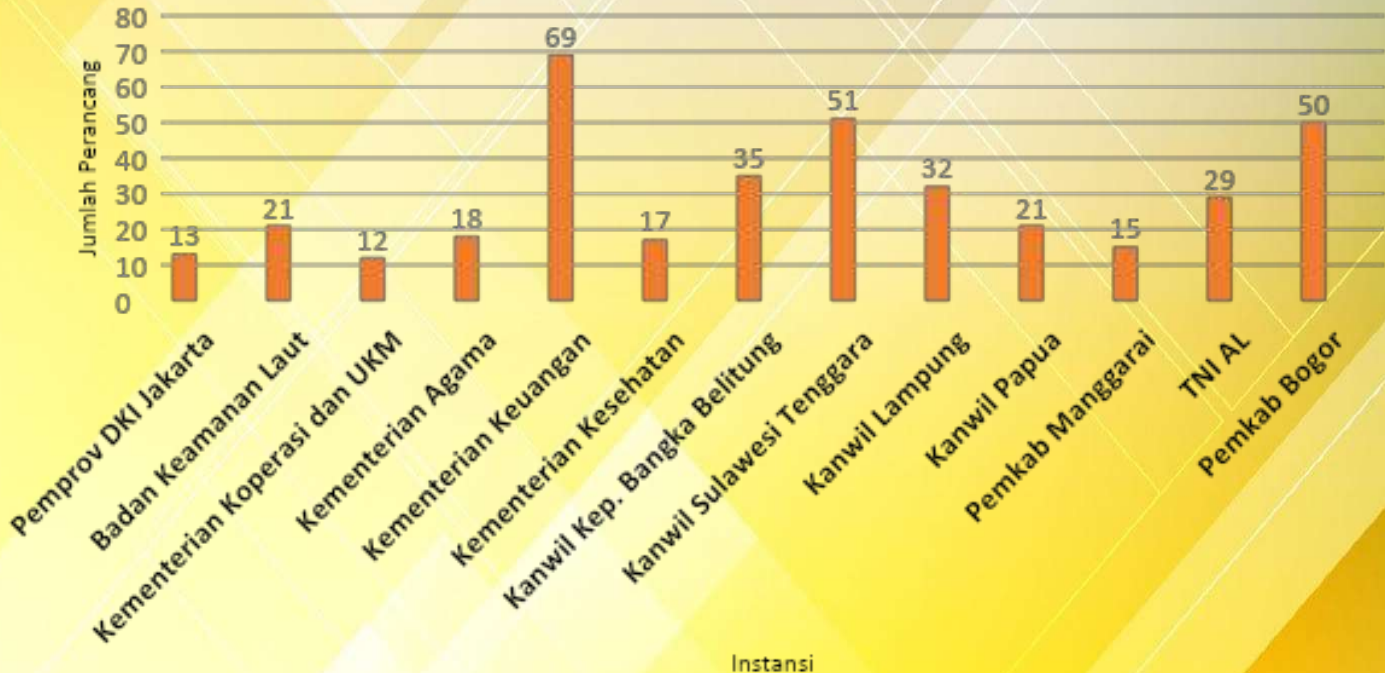
\*Supervisi :

Ditjen PP melakukan pendampingan/supervisi kepada Kanwil pada saat Kanwil melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Perda

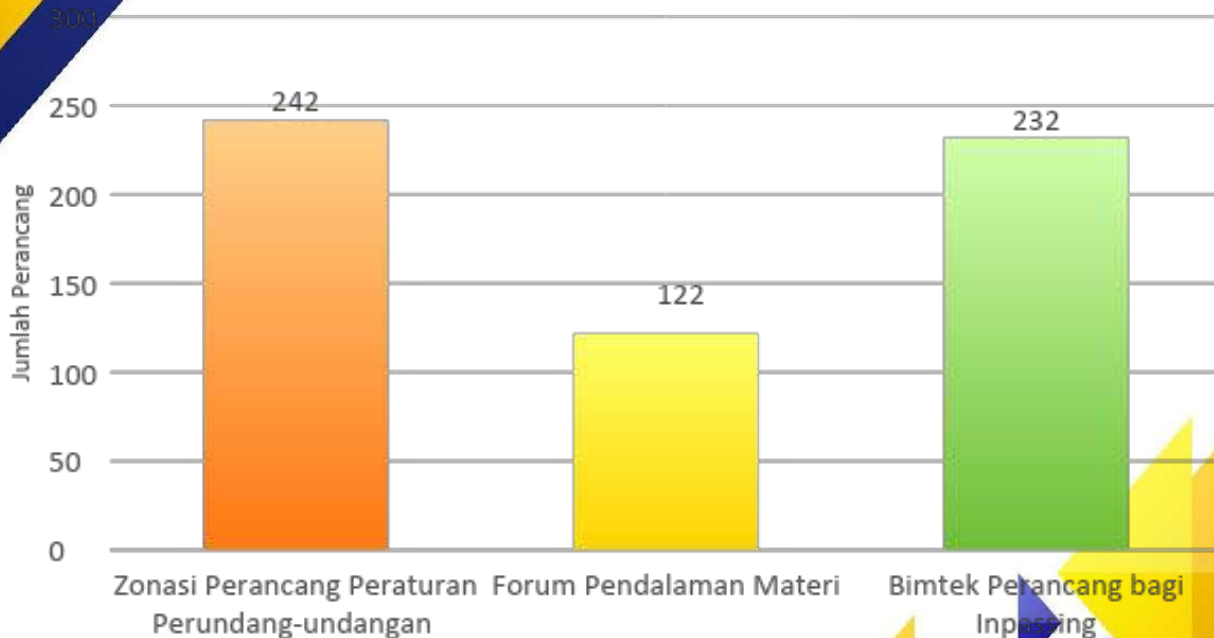
## FASILITASI KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH



## JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIK PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## KEGIATAN PEMBINAAN KARIR PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2022





# JUMLAH DATA PERANCANG TINGKAT NASIONAL SAMPAI DENGAN PERIODE DESEMBER 2022

**REKAP PEMUTAKHIRAN DATA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TINGKAT NASIONAL  
PERIODE TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

DATA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JENIS KELAMIN		JENJANG JABATAN FUNGSIONAL										JUMLAH (HORIZONTAL)
	L	P	PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA		TIDAK JELAS	
			(III/a)	(III/b)	(III/c)	(III/d)	(IV/a)	(IV/b)	(IV/c)	(IV/d)	(IV/e)		
DITJEN PP	53	49	14		52		31			5		0	102
			3	11	34	18	18	11	2	2	3		
KANWIL KEMENKUMHAM	361	272	268		295		70			0		0	633
			22	246	246	49	62	7	1	0	0		
KEMENTERIAN	265	191	170		220		64			2		0	456
			95	75	87	133	35	28	1	2	0		
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	79	68	47		52		47			1		0	147
			25	22	28	24	37	10	0	1	0		
PEMERINTAH DAERAH	106	76	125		52		5			0		0	182
			70	55	33	19	1	4	0	0	0		
KEMENKUMHAM PUSAT (EXC. DITJEN PP)	21	30	42		8		1			0		0	51
			11	31	8	0	0	1	0	0	0		
<b>SUB TOTAL (VERTIKAL)</b>	<b>885</b>	<b>686</b>	<b>666</b>		<b>679</b>		<b>218</b>			<b>8</b>		<b>0</b>	<b>1571</b>
			226	440	436	243	153	61	4	5	3		
<b>TOTAL (VERTIKAL)</b>	<b>1571</b>												<b>1571</b>

## TUGAS SEBAGAI INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perancang;
2. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang;
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perancang;
4. Menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Perancang;
5. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya;
6. Menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Perancang;
7. Menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang;
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Perancang pada lembaga pelatihan;
9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang;
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Perancang;

## TUGAS SEBAGAI INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11. **Melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang;**
12. **Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang;**
13. **Memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang;**
14. **Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perancang;**
15. **Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Perancang;**
16. **Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;**
17. **Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Perancang di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;**
18. **Melakukan koordinasi dengan Instansi Pengguna dalam rangka pembinaan karier Perancang; dan**
19. **Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.**

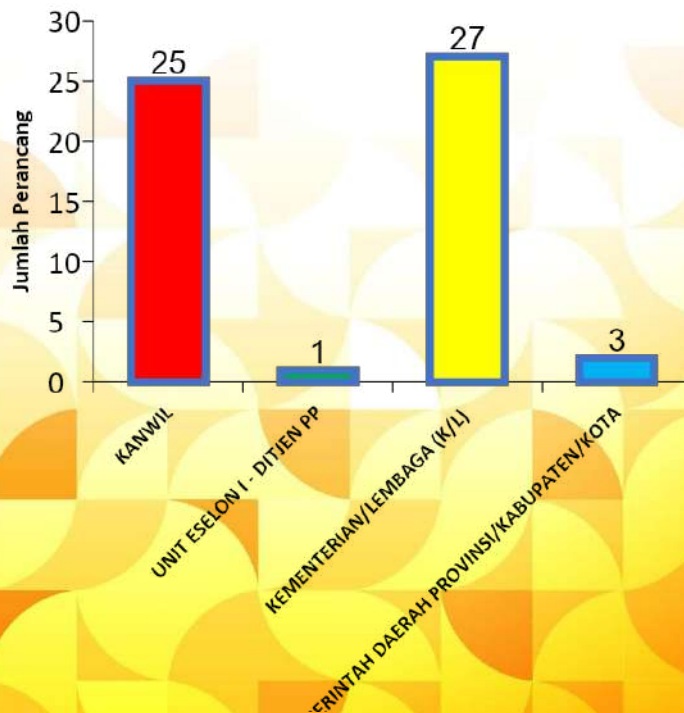
## PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Terdiri dari:**

- 1. Pendampingan pada Unit Eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM;**
- 2. Pendampingan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;**
- 3. Pendampingan pada Kementerian/Lembaga; dan**
- 4. Pendampingan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**

## PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 BERDASARKAN JUMLAH INSTANSI

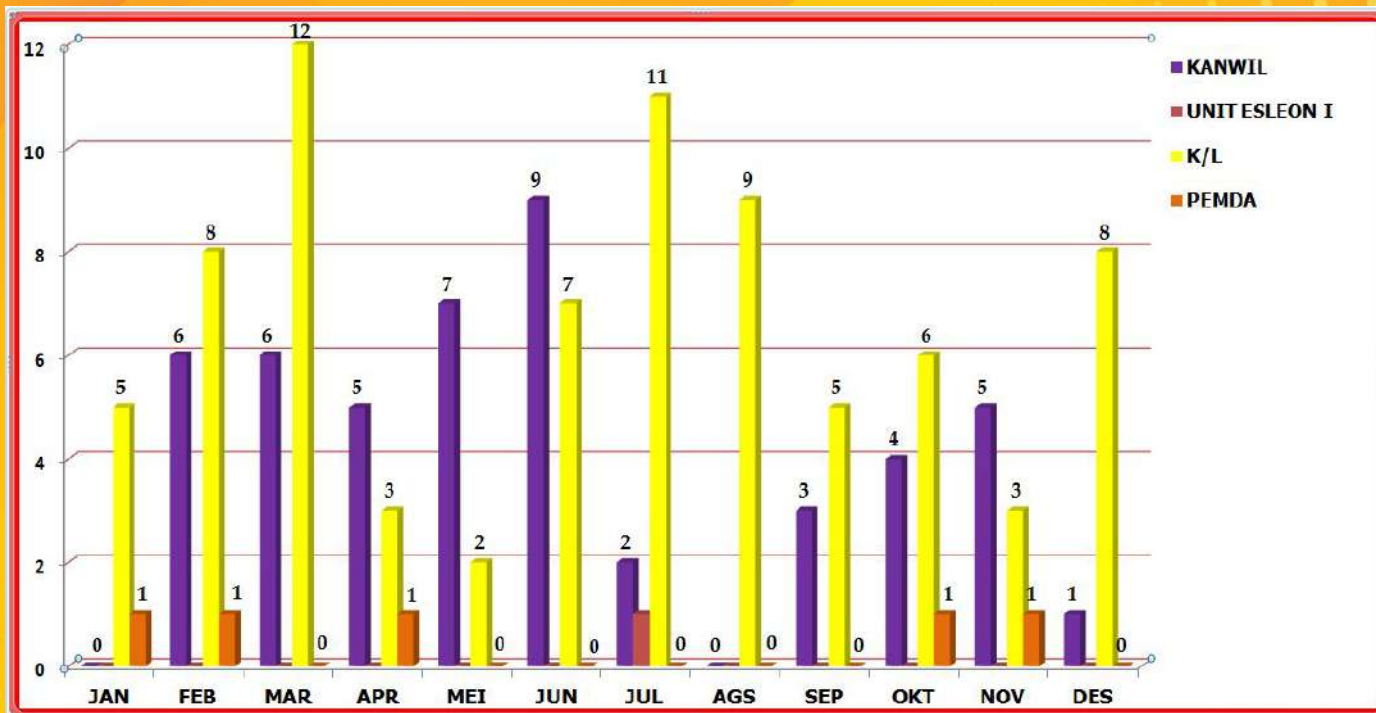
NO.	INSTANSI	JAN - DES 2022
<b>A. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>		
1	KANWIL	25
2	UNIT ESELON I - DITJEN PP	1
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>
<b>B. KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)</b>		
1	KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)	27
2	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	3
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>



## PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 BERDASARKAN JUMLAH KEGIATAN PER BULAN

NO.	INSTANSI	TAHUN 2022												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
<b>A. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM</b>														
1	KANWIL	0	6	6	5	7	9	2	0	3	4	4	1	42
2	UNIT ESLEON I	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>43</b>
<b>B. KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)</b>														
1	KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)	5	8	12	3	2	7	11	9	5	6	3	7	68
2	PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>115</b>

## GRAFIK PENDAMPINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2022 BERDASARKAN JUMLAH KEGIATAN PER BULAN





# DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN







## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### TUGAS

1. PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN, DAN SISTEM INFORMASI PUU

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN, DAN SISTEM INFORMASI PUU

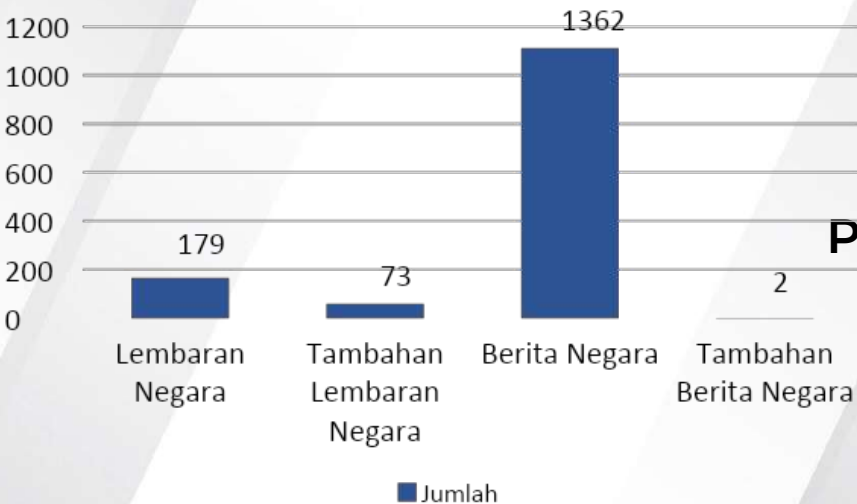
3. PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN, DAN SISTEM INFORMASI PUU

4. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN



## JUMLAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 Januari s.d 29 Desember 2022



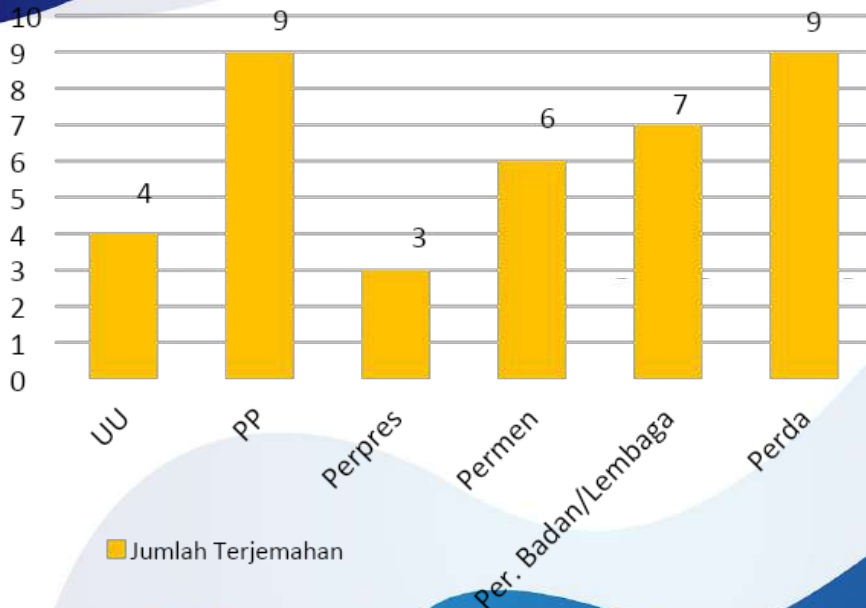
**1541**  
Total  
Pengundangan

## JUMLAH PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



38

Total Terjemahan



### UU yang sudah Diterjemahkan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## JUMLAH PUBLIKASI JURNAL LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Maret

Volume 19 Nomor 1, 10 Artikel

Juli

Volume 19 Nomor 2, 10 Artikel

Oktober

Volume 19 Nomor 3, 10 Artikel

Desember

Volume 19 Nomor 4, 10 Artikel

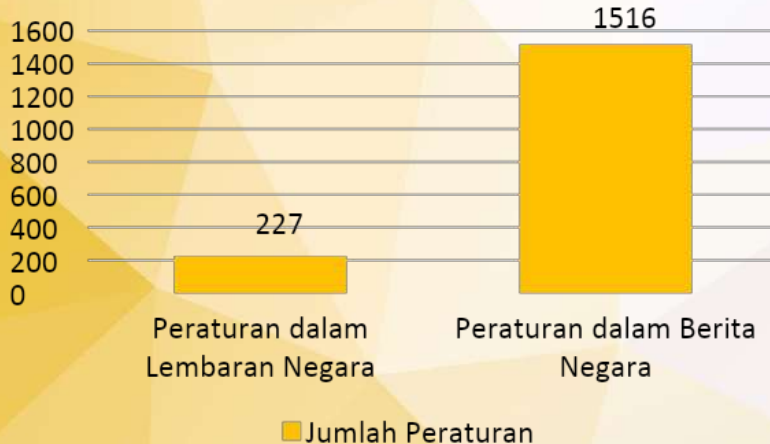
\*dapat diakses oleh publik melalui: <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

# PENGUNGGAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUNJUNG WEBSITE PERATURAN.GO.ID

Total Publikasi  
Peraturan

1743

Januari s.d Desember 2022



## JUMLAH APLIKASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. **PERATURAN.GO.ID**
2. **E-PENYUSUNAN**
3. **E-PERANCANG**
4. **JDIH DITJEN PP**
5. **E-JURNAL LEGISLASI INDONESIA**
6. **E-LITIGASI**
7. **E-PENERJEMAHAN**
8. **E-PARTISIPASI PUBLIK**
9. **E-PENGUNDANGAN**
10. **E-HELPDESK**





# DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





## TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### FUNGSI

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### TUGAS

1. PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG LITIGASI

4. PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG LITIGASI

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG LITIGASI

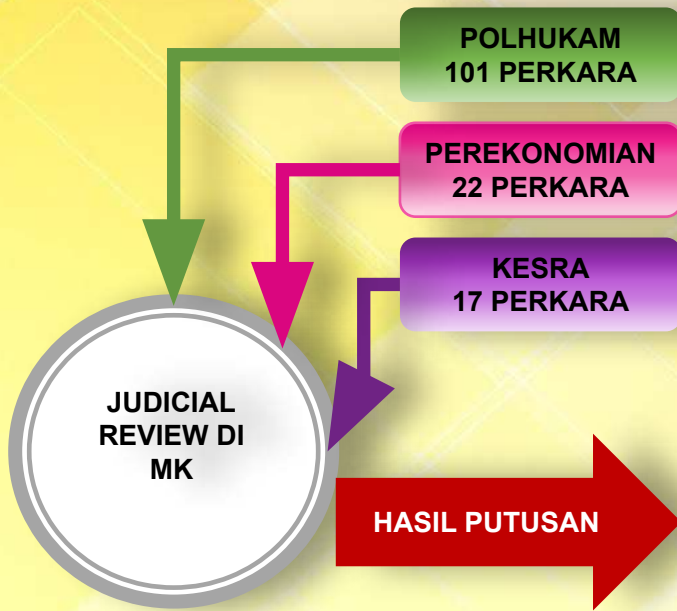
5. PENYIAPAN PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM (LO)

3. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG LITIGASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR PENGADILAN

6. PELAKSANAAN URUSAN KETATAUSAHAAN



## JUMLAH JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN DI MK TAHUN 2022



NO	PENANGANAN PERKARA	POLHUKAM	PEREKONOMIAN	KESRA
1	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA	29	3	6
2	DIKABULKAN SEBAGIAN	10	1	0
3	MENOLAK PERMOHONAN SELURUHNYA	24	10	3
4	PERMOHONAN DITARIK KEMBALI	11	3	4
5	MENGABULKAN SELURUHNYA	1	0	0
6	MENOLAK PERMOHONAN SEBAGIAN	8	2	0
7	GUGUR	1	0	0
8	DALAM PROSES	17	3	4
	<b>TOTAL PERKARA</b>	<b>101</b>	<b>22</b>	<b>17</b>




## JUMLAH JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN DI MA TAHUN 2022



NO	PENANGANAN PERKARA	POLHUKAM	PEREKONOMIAN	KESRA
1	Tolak Permohonan	2	5	4
2	Kabul Permohonan	0	1	1
3	Menolak Sebagian	0	0	0
4	Dalam Proses	3	3	2
	<b>Total Perkara</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

# DATA PUTUSAN E - LITIGASI

The screenshot shows the e-Litigasi website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'e-Litigasi' and links for 'BERANDA', 'PERKARA MK', and 'LOGIN'. The main heading reads 'Selamat Datang di Website E-Litigasi' followed by the subtitle 'Pengujian Perkara Peraturan Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi'. Below this is a search bar with the placeholder text 'ketik perkara yang ingin dicari' and a green 'CARI' button. The search results are displayed in three columns, each with an icon, a count, and a category name:

Icon	Count	Category
	329	POLHUKAM
	179	PEREKONOMIAN
	97	KESRA

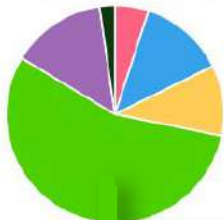
# DATA PUTUSAN E - LITIGASI



329

POLHUKAM

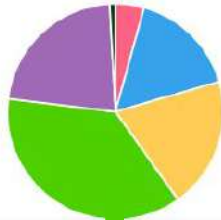
## REKAPITULASI POLHUKAM



175

PEREKONOMIAN

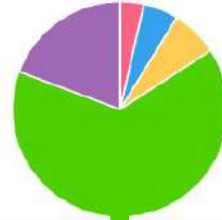
## REKAPITULASI PEREKONOMIAN



97

KESRA

## REKAPITULASI KESRA

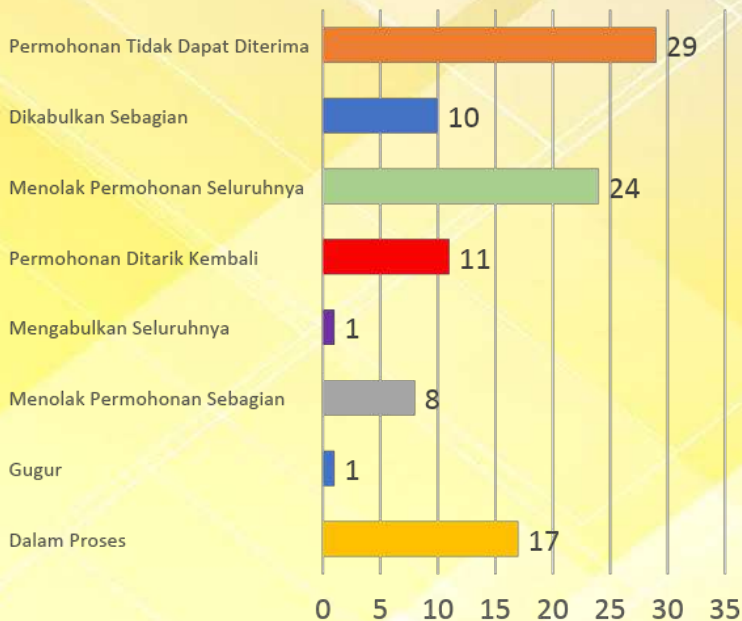


JUMLAH KOLEKSI DATA PERKARA PER-BIDANG, MENGINFORMASIKAN PASAL YANG DIUJI SERTA *SOFTCOPY* PUTUSAN DAPAT DIUNDUH

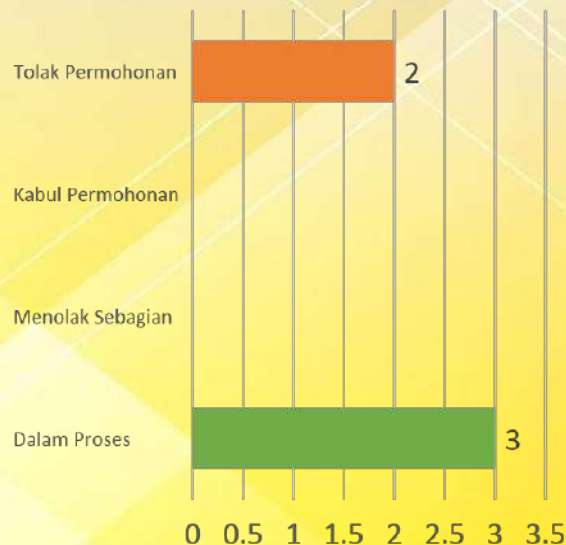
RASIO JENIS PUTUSAN PER-BIDANG

# GRAFIK JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN BIDANG POLHUKAM DI MK DAN MA TAHUN 2022

## POLHUKAM (MK)



## POLHUKAM (MA)

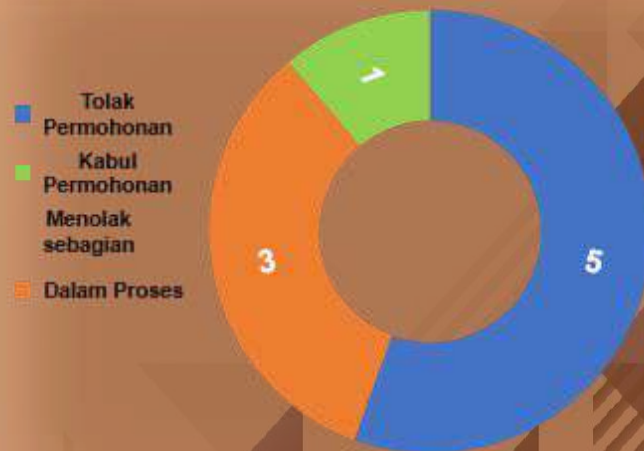


## GRAFIK JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN BIDANG PEREKONOMIAN DI MK DAN MA TAHUN 2022

### PEREKONOMIAN (MK)

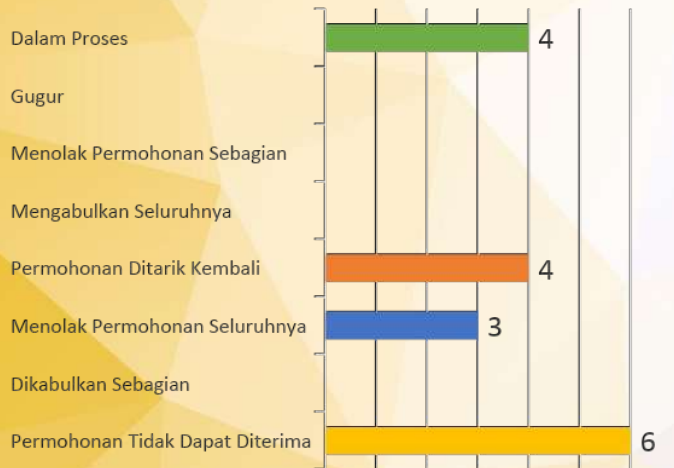


### PEREKONOMIAN (MA)



# GRAFIK JUDICIAL REVIEW DAN PUTUSAN BIDANG KESRA DI MK DAN MA TAHUN 2022

## KESRA (MK)



## KESRA (MA)



# PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN), LEGAL OPINION, EXECUTIVE REVIEW TAHUN 2022

PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)		
POLHUKAM	PEREKONOMIAN	KESRA
1	-	-



LEGAL OPINION/ PENDAPAT HUKUM		
POLHUKAM	PEREKONOMIAN	KESRA
-	1	4

**PENYELESAIAN DISHARMONI SECARA  
MEDIASI**

EXECUTIVE REVIEW/ PENYELESAIAN DISHARMONI SECARA MEDIASI		
POLHUKAM	PEREKONOMIAN	KESRA
-	-	-



PRODUK DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

*Launching*

# DIGITALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



# INOVASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## OPERA

MERUPAKAN SARANA KOMUNIKASI DAN DISKUSI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SELURUH INDONESIA



## PERATURAN.GO.ID

MERUPAKAN MEDIA PUBLIKASI DAN DATABASE SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



## E-PERANCANG

MERUPAKAN APLIKASI DATABASE PERANCANG DAN DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIA PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG. APLIKASI INI MENUNJANG PELAKSANAAN TUSI DITJEN PP SEBAGAI INSTANSI PEMBINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## E-LITIGASI

MERUPAKAN APLIKASI YANG MEMUAT INFORMASI TERKAIT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAIK PADA MK DAN MA



## E-PENERJEMAHAN

MERUPAKAN APLIKASI PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM BAHASA INGGRIS



## E-PENYUSUNAN

MERUPAKAN APLIKASI YANG MEMUAT INFORMASI TERKAIT PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



# INOVASI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## E-HELPDESK

MERUPAKAN LAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SECARA TERJADUAL DALAM MEMBERIKAN ASISTENSI DAN KONSULTASI KEPADA SELURUH TENAGA PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA



## E-JURNAL

MERUPAKAN APLIKASI DALAM PENERBITAN JURNAL INDONESIA. JURNAL ILMIAH YANG MEMUAT ARTIKEL HASIL PENELITIAN, KAJIAN DAN PEMIKIRAN DALAM BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## E-PARTISIPASI PUBLIK

MERUPAKAN APLIKASI UNTUK MENERIMA MASUKAN, TANGGAPAN, ATAU PANDANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS

# PENGHARGAAN

YANG DIPEROLEH DITJEN PP



**KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN 2021**

TERBAIK III (KETIGA) DALAM KINERJA  
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021



**APRESIASI KINERJA  
SATKER KPPN JAKARTA V**

PERINGKAT II (KEDUA) TERKAIT  
JUMLAH TRANSKRIP KKP TERBESAR



**PENGHARGAAN UNIT UTAMA  
KEMENKUMHAM**

PENGHARGAAN ATAS  
DUKUNGANNYA DALAM  
PROGRAM PEMAJUAN HAM

# PENGHARGAAN

YANG DIPEROLEH DITJEN PP



## PENGHARGAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKUMHAM RI

ATAS PRESTASINYA TELAH TUNTAS  
MENINDAKLANJUTI SELURUH  
TEMUAN/REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI.



## MELUNCURKAN BUKU TANYA JAWAB

BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH HASIL  
KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT  
JENDERAL PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM RI DENGAN JAPAN  
INTERNATIONAL AGENCY (JICA)



## MELUNCURKAN DIGITALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- **PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** : PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, PENGUNDANGAN.
- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** : PERATURAN TERTULIS YANG MEMUAT NORMA HUKUM YANG MENGIKAT SECARA UMUM DAN DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA PEJABAT YANG BERWENANG MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- **PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS)** : INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
- **PROGRAM LEGISLASI NASIONAL JANGKA MENENGAH** : INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
- **PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS** : INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
- **PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH (PROGSUN PP)** : INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.

- **PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN (PROGSUN PERPRES)** : INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS YANG DISUSUN DALAM SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL.
- **PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN PENGHARMONISASIAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** : PROSES PENYELARASAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA MENJADI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG UTUH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL.
- **PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT PERANCANG** : PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG YANG DIBERI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SECARA PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYUSUNAN INSTRUMENT HUKUM LAINNYA.
- **JUDICIAL REVIEW ATAU HAK UJI MATERI** : PROSES PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEBIH TINGGI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PERADILAN.

**INFO SELENGKAPNYA,  
SCAN BARCODE**



**[WWW.DITJENPP.KEMENKUMHAM.GO.ID](http://WWW.DITJENPP.KEMENKUMHAM.GO.ID)**



